

# Buku Panduan Program Review



# Buku Panduan Program Review

Edisi ke-2

Buku Panduan *Program Review* edisi ke-2  
Copyright© 2024 Yayasan Nusantara Sejati  
dan Koso Nippon

## Pengarah

BSKDN Kemendagri : Yusharto Huntoyungo  
BAPPENAS : Bogat Widyatmoko  
KemenPan - RB : Erwan Agus Purwanto  
Koso Nippon : Hideki Kato  
Yayasan Nusantara Sejati : Eka Toba Putra Simanjuntak

## Penyusun

Yayasan Nusantara Sejati : Imanuel Djahi, Difa Stefanie  
Koso Nippon : Taki Kitada, Azrohal Hasan  
Atmawidya Alterasi Indonesia : Titok Hariyanto, Sunaryo Hadi Wibowo  
BSKDN Kemendagri : Faisal Syarif, Jerry Walo, Tito Dwian  
Maulana, Adinda Aura Salsabil

## Editor

Olin Monteiro

## Perancang Grafis

Cipsi Studio

## Diterbitkan oleh

Yayasan Nusantara Sejati  
Jl. Gereja No.51, RT.7/RW.9, Cilandak Barat Kec. Cilandak,  
Kota Jakarta Selatan Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12430



# Pengantar dari Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN)

## Dr. Yusharto Huntoyungo, M.Pd.

Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri

Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) merupakan salah satu Unit Kerja Eselon I di lingkup Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), yang memiliki tugas untuk menyelenggarakan perumusan, penyusunan dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri. Strategi kebijakan yang disusun oleh BSKDN meliputi seluruh urusan pemerintahan dalam negeri dan berkaitan dengan Pemerintah Daerah.

Kemendagri juga memahami bahwa evaluasi merupakan salah satu tahapan yang penting dalam lingkup program/kegiatan Pemerintah Daerah, di samping perencanaan dan pelaksanaan. Melalui evaluasi, Pemerintah Daerah dapat mengetahui capaian program/kegiatan yang selama ini telah berjalan, serta berbagai tantangan yang masih perlu dihadapi selama berjalannya program/kegiatan tersebut. Hasil evaluasi tersebut tentunya akan menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam merencanakan program/kegiatan di masa mendatang. Untuk itu, *Program Review* hadir sebagai salah satu pilihan pendekatan evaluasi pembangunan yang mengedepankan partisipasi masyarakat. Pendekatan ini dapat digunakan untuk mengevaluasi program, kegiatan, maupun subkegiatan serta mengungkap adanya efisiensi karena dapat dilakukan secara sederhana.

Kami sangat mengapresiasi adanya Dukungan Evaluasi Kebijakan di Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Melalui Penerapan *Program Review*, yang diinisiasi oleh Koso Nippon bekerja sama dengan Yayasan Nusantara Sejati (YNS). Hadirnya *Program Review* ini memberikan satu alternatif baru untuk mengevaluasi berbagai kegiatan di daerah, melalui masyarakat sebagai penilai utama.

“

*Program Review* ini diharapkan akan mempermudah daerah untuk menganalisis program/kegiatan mereka yang dirasai bermanfaat atau kurang bermanfaat bagi masyarakat, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi daerah untuk menyusun program/kegiatan yang lebih baik dan bermanfaat pada tahun mendatang.

”

Buku panduan ini merupakan buah dari kerja sama dan diskusi antara BSKDN dengan Koso Nippon dan YNS serta berdasarkan pengalaman uji coba Implementasi *Program Review* di beberapa daerah, yakni Kabupaten Bantul, Kabupaten Sinjai, dan Kota Surabaya. Penerapan *Program Review* di daerah-daerah tersebut mendapatkan respon yang positif dari rekan-rekan di daerah, khususnya masyarakat, karena masyarakat sangat dilibatkan dalam program ini. Ke depannya, pemanfaatan dari *Program Review* diharapkan juga dapat dirasakan oleh daerah-daerah lain khususnya untuk mendukung evaluasi program/kegiatan Pemerintah Daerah yang lebih optimal.

# Pengantar dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)

## **Bogat Widyatmoko**

Deputi Bidang Politik, Hukum,  
Pertahanan dan Keamanan  
Kementerian PPN/Bappenas

Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen yang kuat terhadap prinsip pemerintahan terbuka dengan menginisiasi pendirian dan bergabung dalam Open Government Partnership (OGP) sejak 2011. Melalui Sekretariat Open Government Indonesia (OGI) yang bernaung di bawah Kementerian PPN/Bappenas, upaya ini terus didorong dengan merumuskan dan mendokumentasikan praktik baik keterbukaan pemerintah, yang dilakukan secara ko-kreasi bersama masyarakat sipil.

Salah satu inisiatif penting dalam Rencana Aksi Nasional (RAN) OGI VI adalah *Program Review*, yang menekankan pentingnya partisipasi publik dalam evaluasi program pemerintah. Inisiatif ini merupakan terobosan penting karena proses evaluasi program yang selama ini dilakukan belum banyak melibatkan masyarakat secara langsung. Dengan adanya *Program Review*, diharapkan akan ada perubahan positif yang berkelanjutan dalam cara perencanaan pembangunan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Peluncuran Buku Panduan edisi ke-2 diharapkan bisa memberikan panduan praktis dan pengalaman yang berguna untuk implementasi *Program Review* di berbagai level pemerintahan.

“

Penyesuaian konteks sosio-kultural dan ekonomi dari praktik di negara lain perlu menjadi fokus agar pendekatan ini relevan dan sesuai dengan budaya lokal. Buku panduan ini menyajikan langkah-langkah praktis dalam melaksanakan *Program Review*, berdasarkan pengalaman yang telah dibangun dari berbagai daerah di Indonesia, mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga pelaporan hasil evaluasi.

”

Semoga dengan pelaksanaan *Program Review* dan panduan yang ada, masyarakat dapat merasakan manfaat dari partisipasi bermakna dalam proses pembangunan, dan dampak positifnya dapat dinikmati oleh semua pihak. Kami berharap buku panduan ini dapat menjadi referensi bagi para pembuat kebijakan, praktisi pembangunan, dan masyarakat luas dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terbuka dan pembangunan yang berpusat pada masyarakat.

Akhir kata, kami ucapkan selamat atas pelaksanaan *Program Review* dan peluncuran Buku Panduan edisi ke-2.

# Pengantar dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Kemenpan-RB)

**Prof. Dr. Erwan Agus Purwanto, M.Si**

Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas  
Aparatur, dan Pengawasan

Pemerintah Jepang dikenal sebagai salah satu pemerintahan yang efektif. Indikasinya adalah tingginya skor *Government Effectiveness Index* (GEI) yang diraih Jepang dari tahun ke tahun. Sebagai gambaran, pada tahun 2022, World Bank memberikan skor GEI 1,62 untuk Jepang. Dengan skor tersebut Jepang menduduki peringkat 9 dari 173 negara dunia.

Secara nyata, pengelolaan berbagai sektor publik oleh Pemerintah Jepang memang tidak diragukan lagi efektivitasnya. Setidaknya hal tersebut ditunjukkan pada sektor yang terkait dengan urusan: *Disaster Management and Preparedness, Public Health and Longevity, Infrastructure*, termasuk juga *Economic Innovation and Technology*. Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Jepang untuk mencapai efektivitas tinggi dalam menjalankan roda pemerintahan adalah dengan memastikan program pemerintah secara nyata mampu menjawab kebutuhan dan masalah yang terjadi di masyarakat, baik dari *design* program maupun dari sisi program *delivery*-nya. Kami melihat *Program Review* yang diterapkan secara baik oleh Pemerintah Jepang menjadi salah satu mekanisme yang mampu diandalkan untuk dapat terus menjaga konsistensi perumusan dan implementasi berbagai program pemerintah yang berkualitas.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) sebagai salah satu instansi pemerintah yang memiliki peran untuk mendorong terwujudnya pemerintahan yang berorientasi hasil/dampak melalui Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah tentu memandang *Program Review* menjadi salah satu *best practices* yang sangat layak untuk dijadikan acuan oleh Pemerintah Indonesia dalam mengevaluasi berbagai program pembangunan. Apalagi, teknik reuiu program yang langsung melibatkan masyarakat dalam prosesnya sangat sesuai dengan sistem pemerintahan Indonesia yang demokratis dengan pelibatan masyarakat pada berbagai tahapan perumusan maupun implementasi program pembangunan.

“

Keberhasilan Kabupaten Bantul, Kabupaten Sinjai dan Kota Surabaya sebagai *pilot project* implementasi *Program Review* di Indonesia ini juga menunjukkan bahwa metode ini *doable*, khususnya pada level Pemerintah Desa dan Pemerintah Kabupaten. Tentu hal ini sejalan dengan semangat “Membangun Indonesia dari Desa”.

”

Semoga implementasi *Program Review* semakin masif sehingga banyak pemerintah daerah lain yang mengikuti jejak Kabupaten Bantul, Kabupaten Sinjai dan Kota Surabaya dalam mengimplementasikan *Program Review* ini. Harapannya dengan mengimplementasikan *Program Review*, maka pemilihan program menjadi lebih berdampak sehingga manfaatnya benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat.

# Pengantar dari Koso Nippon

## Hideki Kato

Presiden Koso Nippon

Kepada Masyarakat Indonesia,  
Sudah 14 tahun berlalu sejak kami pertama kali memperkenalkan *Program Review* yang telah terbukti efektif di Jepang ke Indonesia pada tahun 2007. Seiring berjalannya waktu, kami merasa sangat bersyukur bahwa pelaksanaan *Program Review* di Indonesia, dengan dukungan dari Koso Nippon, telah berlangsung selama 4 tahun. Selama periode ini, kami juga berhasil memperkenalkan proyek ini sebagai bagian dari proyek ODA (Official Development Assistance) dari pemerintah Jepang ke pemerintah daerah, dan telah mengadakan 11 kali *Program Review* di 5 pemerintah daerah, termasuk Kota Surabaya. Ini merupakan pencapaian yang luar biasa.

Ke depannya, dengan dukungan dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Reformasi Birokrasi, dan BAPPENAS, kami akan memasuki tahap untuk memperluas *Program Review* ini ke seluruh wilayah Indonesia.

Koso Nippon memiliki pengalaman terbesar dalam membantu pemerintah (baik pusat maupun daerah) untuk melibatkan pendapat warga yang dipilih secara acak dalam *Program Review*. Di dunia internasional, sangat jarang menemukan negara yang menerapkan metode ini secara resmi dan luas seperti yang dilakukan di Jepang dan Indonesia.

“

Yang sangat menarik adalah, dalam *Program Review* di Indonesia, meskipun mengambil inspirasi dari praktik di Jepang, rekan-rekan di Indonesia juga menambahkan banyak inovasi yang unik. Misalnya, di Kota Surabaya, terdapat banyak upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, seperti pertunjukan tarian tradisional anak-anak lokal dan pembacaan hasil pemungutan suara.

”

Upaya ini tidak hanya berfungsi sebagai evaluasi program, tetapi juga menciptakan peluang bagi warga untuk lebih aktif terlibat dalam urusan pemerintahan. Jepang pun memiliki banyak hal yang bisa dipelajari dari Indonesia dalam hal ini.

Gabungan pengalaman Jepang dan kreativitas Indonesia dalam *Program Review* telah menjadi aset berharga bagi kedua negara. Kami merasa sangat terhormat dapat turut berkontribusi pada perkembangan *Program Review* di Indonesia.

Mari kita terus upaya kolaborasi ini antara Indonesia dan Jepang, untuk memperluas model inovatif *Program Review* yang melibatkan partisipasi warga ini ke Asia dan bahkan ke seluruh dunia! Kami berharap dapat terus mendapatkan dukungan dan kerjasama yang tak tergoyahkan dari Anda semua. Terima kasih.

# Pengantar dari Yayasan Nusantara Sejati

## Eka Toba Putra Simanjuntak

Direktur Eksekutif Yayasan Nusantara Sejati

Sebagai yayasan yang memiliki perhatian pada isu tata kelola pemerintahan dan pembangunan wilayah serta pemberdayaan masyarakat, Yayasan Nusantara Sejati sangat mengapresiasi inisiatif Koso Nippon memperkenalkan dan mensosialisasikan *Program Review* di Indonesia.

*Program Review* adalah pendekatan yang dapat digunakan mengevaluasi program-program pemerintah, mulai dari program pemerintah pusat hingga pemerintah desa. Seperti kita ketahui, pemerintah sendiri sudah memiliki sistem untuk mengevaluasi program-programnya, namun proses evaluasinya masih belum melibatkan masyarakat sebagai penerima manfaat dari program-program itu.

Presiden Jokowi dalam berbagai kesempatan sering kali menekankan bahwa program-program pemerintah harus menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat. Ada banyak kritik juga disampaikan terhadap program-program pemerintah yang hanya mengejar target angka atau kuantitas, tanpa mempertimbangkan kualitas dan dampak jangka panjang yang dapat dirasakan oleh masyarakat luas.

“

Bila mengacu pada teori perubahan (*Theory of Change*), pelaksanaan program ataupun kegiatan pemerintah seharusnya tidak hanya berorientasi pada *Output* (keluaran yang bersifat kuantitatif). Program ataupun kegiatan yang baik adalah yang terbukti mampu memberikan dampak jangka pendek (*Outcome*) dan jangka panjang (*Impact*).

”

Oleh karena itu, *Program Review* ini menjadi penting untuk digunakan oleh Pemerintah Indonesia baik oleh pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah hingga Pemerintah Desa. Melalui *Program Review*, Pemerintah dapat terus menyempurnakan pelaksanaan program atau kegiatannya agar benar-benar dapat memberikan dampak yang optimal bagi masyarakat. *Program Review* ini juga dapat menjadi alat untuk menilai apakah sebuah program atau kegiatan yang sudah dijalankan masih perlu diteruskan atau sebaiknya dihentikan, karena tidak memiliki dampak positif sesuai yang diharapkan.

Akhirnya kita berharap buku ini dapat bermanfaat bagi pemerintah untuk memperbaiki kualitas layanan kepada masyarakat dan memenuhi amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik.

# Daftar isi

---

Pengantar dari BSKDN	iv
Pengantar dari Bappenas	vi
Pengantar dari Kemenpan-RB	viii
Pengantar dari Koso Nippon	x
Pengantar dari Yayasan Nusantara Sejati	xii

---

## Bab 01 1

1.1	Pendahuluan	3
1.2	Tentang <i>Program Review</i>	5
1.3	Mengapa <i>Program Review</i> ?	7
1.4	Prinsip Dasar <i>Program Review</i>	13
1.5	Aspek yang perlu diperhatikan dalam pemilihan program dan waktu penyelenggaraan <i>Program Review</i>	15

---

## Bab 02 17

2.1	Unsur Penyelenggaraan <i>Program Review</i>	19
2.2	Instrumen <i>Program Review</i>	21

---

## Bab 03 23

3.1	Tahapan Persiapan Penyelenggaraan <i>Program Review</i>	25
3.2	Persiapan Teknis dan Tata Letak <i>Program Review</i>	34
3.3	Alur Pelaksanaan <i>Program Review</i>	37

---

## Bab 04 45

4.1	Cerita Perubahan	47
4.2	Kendala dan Tantangan Pelaksanaan <i>Program Review</i>	53

---

## Bab 05 57

Pembiayaan <i>Program Review</i>	59
----------------------------------	----

---

## Bab 06 61

Uji Coba Pelaksanaan <i>Program Review</i> Kota Surabaya dan Kabupaten Sinjai	63
---	----



# Perjalanan *Program Review* di Indonesia

2010

Mulai Sosialisasi *Program Review* ke DPD RI bersama Koso Nippon

2011-2012

Memperkenalkan *Program Review* (sortir program) kepada Ibu Siti Nurbaya (Sekjen DPD RI) serta anggota DPD RI dengan dukungan dari JICA

2013

Memperkenalkan *Program Review* dalam studi banding untuk Bappenas, Kemlu, BKPM, LAN, BPK, KemenPAN-RB, Kemendagri dengan dukungan dari Bank Dunia dan Japan International Cooperation Center

2014-2019

Berbagai sosialisasi offline

2019

*Feasibility study* (dengan Bappenas dan KemenPAN-RB)

2020

Memulai proyek *Program Review* dengan dukungan dari Kementerian Luar Negeri Jepang melalui Koso Nippon, yang bekerja sama dengan Yayasan Tifa di Indonesia

2021

- Peluncuran Buku *Program Review* oleh Yayasan Tifa
- Berbagai sosialisasi *Program Review* secara online

2022

- Berbagai sosialisasi ke DPR RI, sekretariat DPD RI, kementerian, dan pemerintah kabupaten/kota
- Pelaksanaan *Program Review* tahun pertama di *Kalurahan* Sriharjo dan Guwosari
- Studi banding *Program Review* di Jepang
- Kunjungan ke KemenPAN-RB, Bappenas

2023

- Peluncuran Buku Panduan *Review Program* oleh Yayasan Tifa
- Memperkenalkan *Program Review* kepada anggota DPD RI
- Pelaksanaan *Program Review* tahun pertama di Kabupaten Bantul & Kota Surabaya
- Pelaksanaan *Program Review* tahun kedua di *Kalurahan* Guwosari dan Sriharjo
- Kunjungan ke Kepala BSKDN Kementerian Dalam Negeri
- Sosialisasi *Program Review* ke berbagai daerah
- Pertemuan Menteri Reformasi Birokrasi dan IT Jepang dengan Menteri PAN-RB Indonesia di Tokyo
- Koso Nippon bekerja sama dengan Yayasan Nusantara Sejati untuk proyek Implementasi *Program Review* di Indonesia

2024

- Pelaksanaan *Program Review* tahun pertama di Kabupaten Sinjai
- Pelaksanaan *Program Review* tahun kedua di Kabupaten Bantul & Kota Surabaya
- Pelaksanaan *Program Review* tahun ketiga di *Kalurahan* Guwosari dan Sriharjo
- Sosialisasi *Program Review* ke berbagai daerah
- Bimbingan Teknis *Program Review* ke BSKDN Kemendagri
- Memperkenalkan *Program Review* ke Kantor Sekretariat Presiden (KSP)
- Penandatanganan MoU antara Yayasan Nusantara Sejati (mitra Koso Nippon di Indonesia) dengan Kementerian Dalam Negeri Indonesia tentang Dukungan Evaluasi Kebijakan di Bidang pemerintahan Dalam Negeri Melalui Penerapan *Program Review*
- Penandatanganan PKS antara Yayasan Nusantara Sejati dengan BSKDN Kemendagri tentang Dukungan Evaluasi Kebijakan di Bidang pemerintahan Dalam Negeri Melalui Penerapan *Program Review*
- Studi banding *Program Review* di Jepang bersama BSKDN & BPSDM Kemendagri, Bappenas, KemenPAN-RB, dan perwakilan daerah

# Bab 01

Program Review  
Kabupaten Bantul  
Maret 2024



## 1.1 Pendahuluan

Bayangkan sebuah daerah di Indonesia yang warganya merasa puas dengan kinerja pemerintah daerahnya yang dengan sepenuh hati membuat kebijakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pemerintah daerah tersebut menempatkan masyarakat sebagai aktor penting dalam memastikan keberhasilan program. Masyarakat senang suaranya didengar sehingga berupaya untuk memberikan masukan yang berarti bagi pembangunan. Pemerintah tidak dibiarkan bekerja sendiri, masyarakat berkontribusi secara aktif.

Di daerah ini sering terjadi ibu rumah tangga, dosen, pedagang, mahasiswa, guru, kepala daerah dan pejabat pemerintahan, serta warga dari berbagai profesi, berkumpul di suatu tempat untuk mengevaluasi sebuah program. Pemerintah menyediakan data yang dibutuhkan untuk dievaluasi. Seluruh unsur bersama-sama menganalisa capaian riil program, bukan hanya sebatas pada aspek administratif saja tetapi juga manfaatnya.

Masukan-masukan dari warga ditinjau untuk perbaikan program.

Upaya pelibatan masyarakat tersebut menghasilkan dampak yang signifikan di internal pemerintahan. Pegawai pemerintah menjadi lebih kritis terhadap penentuan dan pelaksanaan program, lebih responsif dan proaktif, serta menyadari pentingnya mensosialisasikan program kepada masyarakat. Tidak hanya itu, pemerintah juga berhasil meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran dan menciptakan program-program inovatif yang berhasil meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dan yang tak kalah penting, rasa memiliki warga terhadap program meningkat karena suaranya didengar dan merasa dilibatkan dalam membangun daerah. Rasa kepemilikan ini akan meningkatkan kepedulian dan kepercayaan masyarakat terhadap kerja-kerja pemerintah.



Suasana Pelaksanaan Program Review di Kabupaten Bantul, 2024

Gambaran di atas bukanlah sekadar mimpi belaka atau kondisi yang tidak dapat diwujudkan. Upaya pelibatan masyarakat hingga tahap evaluasi dapat diwujudkan melalui implementasi *Program Review*. *Program Review*, adalah satu pendekatan dalam rangka mengevaluasi program pemerintah, yang telah diujicobakan dan dikembangkan di beberapa daerah di Indonesia. Hasil dari uji coba di beberapa daerah menunjukkan bahwa kualitas tata kelola pemerintahan dapat lebih ditingkatkan ketika masyarakat dilibatkan untuk mendapatkan masukan-masukan yang objektif. Keputusan diambil berdasarkan data dan hasil diskusi yang melibatkan setiap unsur terkait. Ini baru permulaan, dengan semangat kolaborasi, pendekatan ini dapat diimplementasikan ke seluruh pelosok negeri untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih terbuka, di mana partisipasi dan suara masyarakat

sangat berarti dan dihargai.

Buku Panduan *Program Review* edisi kedua ini hadir sebagai salah satu upaya lanjutan untuk terus mengenalkan *Program Review* secara luas ke berbagai daerah di Indonesia. Harapannya agar pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan warga masyarakat dapat mengenal pendekatan ini dan memanfaatkannya.

Buku panduan ini merupakan pengembangan dari dua buku yang sebelumnya telah diterbitkan oleh Yayasan Tifa. Buku pertama pada tahun 2021 berjudul *Program Review, Pendekatan Evaluasi Program Pembangunan Berbasis Masyarakat*, berisi pengalaman praktik *Program Review* di negeri asalnya, Jepang, yang telah berlangsung selama 20 tahun. Kemudian buku kedua di tahun 2023 berjudul *Buku Panduan Review Program*, berisi panduan

pelaksanaan *Program Review* berdasarkan hasil, pengalaman dan pembelajaran uji coba *Program Review* dari tahun 2022 hingga 2023.

Buku ketiga yang diterbitkan tahun 2024 ini adalah penyempurnaan dari buku kedua. Buku Panduan Pelaksanaan *Program Review* ini memuat hasil pembelajaran dari berbagai daerah yang telah melaksanakan *Program Review* di

Indonesia pada periode tahun 2022 hingga tahun 2024. Pada tahun 2022, uji coba pertama dimulai di tingkat desa oleh Pemerintah Kalurahan Guwosari dan Kalurahan Sriharjo di Kabupaten Bantul. Di tahun 2023 lokasi bertambah dengan keikutsertaan Pemerintah Kabupaten Bantul dan Kota Surabaya untuk melaksanakan uji coba *Program Review* di tingkat kabupaten/kota, menyusul di tahun 2024 oleh Pemerintah Kabupaten Sinjai.

## 1.2 Tentang Program Review

Pelibatan masyarakat atau partisipasi masyarakat dalam pembangunan bukanlah konsep baru. Sebagai upaya konkret dalam mewujudkannya, pemerintah telah mengatur hal tersebut dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 354 dan diturunkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2017 tentang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Sesuai dengan amanat undang-undang tersebut, partisipasi masyarakat memiliki fungsi sebagai sarana bagi masyarakat dalam mengekspresikan kebutuhan dan kepentingannya sehingga proses pembentukan kebijakan daerah menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Selain itu, partisipasi masyarakat juga merupakan upaya dalam mewujudkan kepedulian dan dukungan

masyarakat untuk keberhasilan pembangunan di daerahnya. Di Indonesia, perencanaan pembangunan sudah dilaksanakan melalui mekanisme yang relatif partisipatif, misalnya dalam penyelenggaraan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat desa hingga nasional yang melibatkan masyarakat. Sayangnya, pelibatan masyarakat pada tahap evaluasi belum secara serius dilakukan seperti pada tahap perencanaan.

Sejauh ini, proses evaluasi yang dilakukan pemerintah masih cenderung pada aspek administratif dan teknokratis. Dalam praktiknya pun, evaluasi yang dilakukan seringkali hanya melibatkan unsur internal pemerintah dan belum menyentuh dampak dari program. Hal ini dapat menyebabkan adanya bias, baik



Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah menurut PP No.45 tahun 2017

terhadap kepentingan kelompok elit maupun terhadap kepentingan masyarakat yang dilibatkan dalam pelaksanaan pembangunan tersebut.

*Program Review* atau Review Program, hadir sebagai salah satu pilihan pendekatan evaluasi pembangunan yang fokus pada dampak dan mengedepankan partisipasi masyarakat. *Program Review* memberikan suatu pengalaman baru dimana evaluasi pelaksanaan pembangunan dilakukan secara lebih partisipatif, terbuka, terfokus, dan objektif.

Dalam pelaksanaan *Program Review*, ada beberapa unsur yang terlibat, seperti Warga Penilai, Evaluator, Pengampu Program, Moderator, serta Panitia Pelaksana. Warga Penilai adalah ‘hakim’ yang sesungguhnya, mereka hadir untuk menilai dan

memutuskan apakah sebuah program layak untuk dilanjutkan, dilanjutkan dengan perbaikan atau dihentikan. Kehadiran unsur-unsur lain dalam pelaksanaan *Program Review* bertujuan membantu Warga Penilai untuk dapat memahami pelaksanaan program dengan baik.

Selain itu, kehadiran pihak eksternal pemerintah yang berperan sebagai Evaluator dalam pelaksanaan *Program Review* berfungsi membantu memberikan pemahaman dan membuka wawasan warga masyarakat yang hadir sebagai Warga Penilai maupun pemerintah sebagai Pengampu Program/kegiatan. Melalui pertanyaan-pertanyaan kritis yang disampaikan evaluator kepada Pengampu Program terkait desain dan pelaksanaan program, membuat program menjadi dapat dipahami secara lebih mudah dan jelas.

### 1.3 Mengapa Program Review

Selama periode tahun 2022 – 2024, Program Review di Indonesia telah dilaksanakan 11 kali, dan ada 19 program pemerintah yang telah di-review. Detail pelaksanaannya dapat dilihat dalam Tabel 1 di bawah ini.

Tahun	Lokasi	Program yang di-review	Jumlah warga penilai
2022	Kalurahan Guwosari	1. Pemberian Makanan Tambahan Posyandu Balita 2. Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	30 Orang
	Kalurahan Sriharjo	1. Pemberian Makanan Tambahan Posyandu Balita 2. Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	30 Orang
2023	Kalurahan Guwosari	1. Pengelolaan Sampah 2. Pendampingan Ibu Hamil Berisiko Tinggi	30 Orang
	Kalurahan Sriharjo	1. Pengelolaan Food Court Srikeminut 2. Fasilitasi Peringatan Hari Jadi Kalurahan Sriharjo	28 Orang
	Kabupaten Bantul	1. Pajak Award 2. Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum	32 Orang
	Kota Surabaya	Pemberian Makanan pada Lansia, Yatim Piatu, dan Penyandang Disabilitas	34 Orang
2024	Kalurahan Guwosari	1. Pelatihan dan Penguatan Penyandang Disabilitas 2. Pelatihan Kewirausahaan Pemuda	30 Orang
	Kalurahan Sriharjo	1. Pengelolaan dan Pengolahan Sampah 2. Penyelenggaraan Posyandu Lansia	30 Orang
	Kabupaten Bantul	1. Pengembangan UMKM 2. Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan	31 Orang
	Kota Surabaya	Pelayanan Kesehatan Lansia melalui Posyandu Keluarga	30 Orang
	Kabupaten Sinjai	Home Care, Home Visit	26 Orang
	<b>Total 19 program</b>		

Tabel 1. Pelaksanaan Program Review di Indonesia

Dari pelaksanaan Program Review di 5 (lima) lokasi di Indonesia, Program Review telah memantik kesadaran warga masyarakat akan pentingnya peran mereka dalam pembangunan, khususnya mengevaluasi program pemerintah. Gambar 1 di bawah ini menunjukkan

bahwa sebagian besar Warga Penilai mengatakan Program Review cukup efektif dalam mengevaluasi program pemerintah, sehingga mereka setuju bahwa metode evaluasi seperti ini perlu dilanjutkan pada tahun-tahun mendatang.

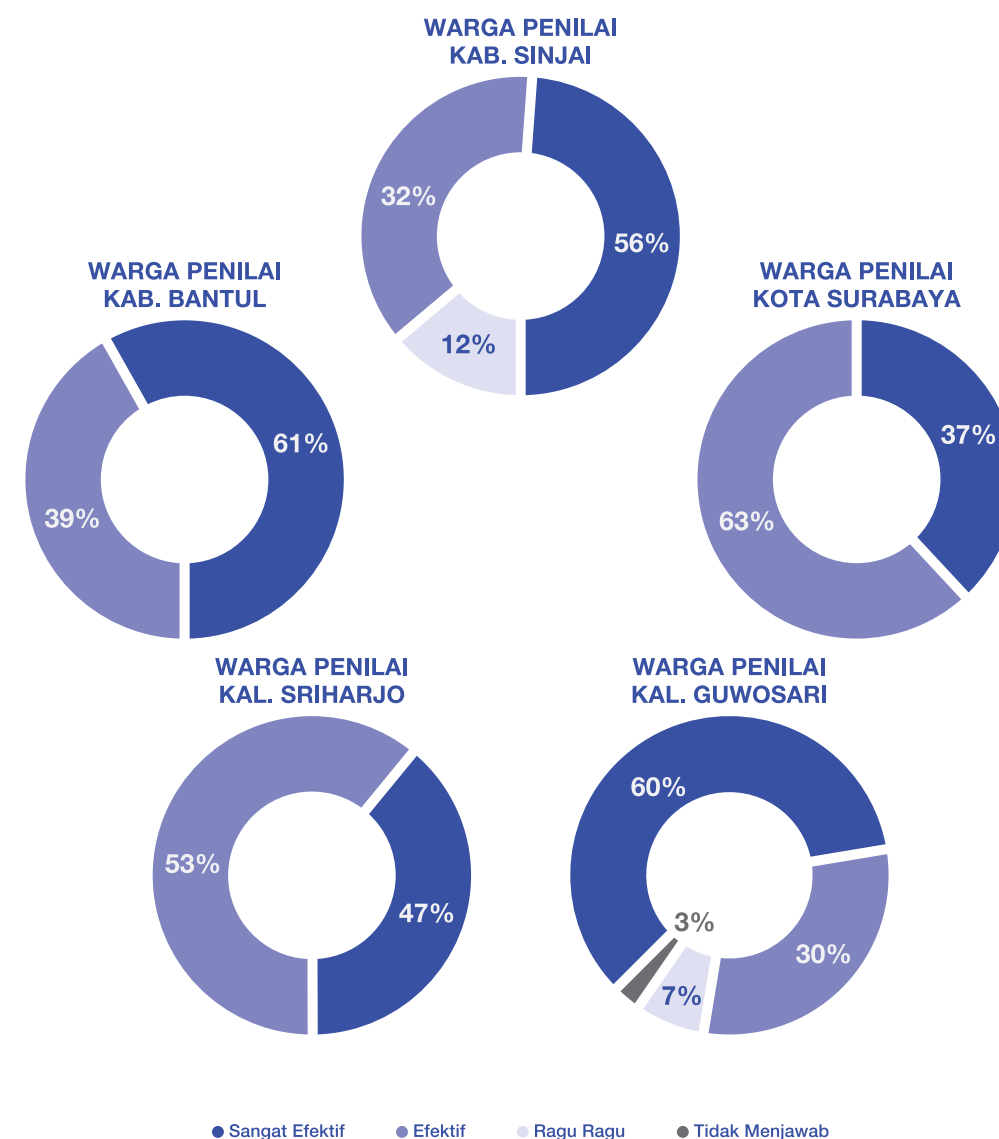


Diagram 1. Persepsi Warga Penilai terhadap keefektifan Program Review

Bagi warga penilai, *Program Review* perlu dilanjutkan dengan alasan:

- a. *Program Review* merupakan sarana untuk menjelaskan program kerja yang dilaksanakan pemerintah (pengampu program) kepada masyarakat. Melalui *Program Review*, masyarakat dapat mengetahui atau memahami program yang dijalankan secara baik dan utuh. Dengan mengetahuinya secara baik, masyarakat dapat terdorong untuk berpartisipasi aktif mendukung program tersebut. Hal ini juga dapat mendorong terciptanya transparansi penyelenggaraan program.
- b. *Program Review* ‘mendekatkan’ masyarakat dengan pemerintahnya, baik di tingkat desa/kalurahan maupun kota/kabupaten. Bagi sebagian besar masyarakat, Balai Desa atau Balai Pertemuan di tingkat kabupaten adalah tempat yang dianggap tidak boleh didatangi oleh sembarang orang. Namun, melalui *Program Review*, mereka bisa bertemu langsung dengan pimpinan daerahnya, datang ke tempat yang sebelumnya tidak pernah mereka datangi.
- c. *Program Review* juga merupakan sarana atau wadah bagi masyarakat untuk memberi masukan kepada pemerintah agar program menjadi lebih

berkualitas (perbaikan program), hemat anggaran, serta memperoleh dukungan masyarakat.

Selain warga penilai, *Program Review* juga dirasakan manfaatnya oleh pemerintah, sebagai Pengampu Program dan Panitia Pelaksana. Bagi pemerintah, manfaat dari *Program Review* adalah:

- a. Pemerintah (Organisasi Perangkat Daerah / OPD terkait) dapat memperoleh masukan langsung dari masyarakat.
- b. *Program Review* merupakan ajang pelatihan bagi aparat pemerintah untuk menjelaskan program dan manfaatnya bagi masyarakat untuk mendorong transparansi pemerintah.
- c. *Program Review* lebih efisien dan efektif karena evaluasi program dilakukan tanpa membutuhkan biaya yang besar.
- d. *Program Review* membantu pemerintah untuk memperbaiki program yang sudah berjalan, terutama dari segi efektivitasnya. Ini menjadi masukan yang baik bagi perencanaan program selanjutnya.
- e. *Program Review* menyadarkan pemerintah (Pengampu Program) untuk menyusun penjelasan program yang lebih sistematis, sederhana dan dengan bahasa yang dapat dipahami masyarakat.

## *Program Review*

adalah metode evaluasi partisipatif yang menilai relevansi, efektivitas, dan efisiensi program pemerintah dengan melibatkan masyarakat dan pihak luar sebagai evaluator. Evaluator adalah pihak di luar pelaksana program yang dapat memberikan pandangan dan masukan yang objektif dan logis terhadap program.

### *Mengapa Program Review?*



1

#### **Perwujudan Kedaulatan Rakyat**

Beberapa pendekatan evaluasi yang dikembangkan seringkali sebatas menempatkan masyarakat sebagai sumber data atau informasi. Dengan *Program Review*, masyarakat benar-benar ditempatkan sebagai penentu atau hakim atas program yang dievaluasi.



2

### Objektif

Seringkali terjadi evaluasi dilakukan oleh pelaksana kegiatan sehingga hasil yang didapatkan cenderung subjektif. *Program Review* dikatakan lebih objektif karena berbasis data dan fakta aktual yang terukur, melibatkan pihak luar yang menilai (warga penilai dan evaluator) sehingga lebih netral dan tidak terpengaruh oleh kepentingan internal, dan diselenggarakan melalui proses yang terstruktur.



3

### Fokus Pada Dampak

*Program Review* meninjau capaian riil program, bukan sebatas pada aspek administratif teknokratis. Selama ini, birokrat seringkali terjebak pada pendekatan evaluasi yang fokus pada aspek-aspek administrasi. Dengan pendekatan *Program Review* ini, maka akan dihasilkan masukan-masukan langsung dari masyarakat maupun evaluator yang lebih kritis dan membangun untuk perbaikan program/kegiatan.



4

### Pengembangan Kapasitas Pegawai Pemerintah

*Program Review* mendorong sekaligus meningkatkan kemampuan pengampu program (pemerintah), khususnya dalam menyampaikan informasi tentang program secara lisan maupun tertulis, kepada masyarakat (saat pengisian lembar informasi program maupun ketika melakukan presentasi program di depan warga penilai).



5

### Sederhana

*Program Review* merupakan pendekatan yang efisien karena dapat dilakukan secara sederhana tanpa menggunakan biaya yang besar dalam mengevaluasi program.



6

### Telah diimplementasikan selama dua dekade di Jepang dan berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan reformasi birokrasi di Jepang

Capaian di Jepang:

- Pemerintah daerah di Jepang menghemat anggaran belanjanya sekitar 10%, sementara di tingkat pemerintah pusat dapat dihemat sekitar 160 miliar Yen per tahunnya.
- Berdasarkan hasil *Program Review* selama beberapa tahun berjalan, berbagai pemerintah daerah di Jepang berhasil menghapus sekitar 1.815 program/kegiatan dengan berbagai alasan.
- Pengalaman menjalankan *Program review* membawa perubahan pada pola pikir pegawai di mana mereka menjadi lebih kritis terhadap program, akuntabel, dan menyadari pentingnya untuk lebih komunikatif dalam menyampaikan program kepada masyarakat.

## 1.4 Prinsip Dasar Program Review

Pendekatan *Program Review* bersifat fleksibel, artinya dalam penerapannya bisa saja ada perbedaan, tujuannya untuk menyesuaikan terhadap kebutuhan wilayah masing-masing. Namun, ada 5 Prinsip Dasar yang wajib dilakukan dalam pelaksanaan *Program Review*, yaitu:



### a. Diskusi Berbasis Program

Dalam *Program Review*, diskusi difokuskan pada program yang telah selesai atau sedang dilaksanakan, karena target *Program Review* adalah menilai kemanfaatan suatu program yang dilaksanakan pemerintah bagi masyarakat.

dapat dilakukan secara campuran (*hybrid*) yaitu langsung (*onsite*) dan daring (misalnya: YouTube) agar dapat disaksikan secara lebih luas. Dengan cara ini, proses diskusi menjadi serius dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.

### b. Diskusi Melalui Lembar Program (LIP dan LEP)

Proses diskusi menggunakan Lembar Informasi Program (LIP) yang sebelumnya telah dibuat dan diisi oleh pemerintah, serta Lembar Evaluasi Program (LEP) yang diisi oleh warga penilai. Kedua lembar ini berfungsi sebagai alat kendali dan kontrol untuk memastikan seluruh variabel evaluasi program telah dibahas.

**e. Diskusi dengan Hasil yang Jelas**  
Kesimpulan diskusi dari *Program Review* harus jelas dan konkret, apakah program dilanjutkan, diperbaiki, atau dihentikan. Jika ada yang harus diperbaiki, maka perbaikannya harus disampaikan secara jelas. Karena dilakukan di tempat terbuka, maka hasilnya akan terpantau bersama. Hasil *Program Review* memang tidak memiliki kekuatan hukum, tetapi melalui *Program Review* ini, pihak pemerintah secara tidak langsung diminta pertanggungjawabannya oleh masyarakat.

### c. Diskusi Dengan Pihak Luar

Pihak luar yang dimaksud adalah Evaluator. Evaluator berfungsi menyampaikan pandangannya berbasis data lapangan, pengetahuan, dan pengalaman mereka secara logis dan objektif.

### d. Diskusi Secara Terbuka

Agar diskusi dapat diikuti secara lebih luas, diskusi *Program Review*





Penghitungan hasil Lembar Evaluasi Program

## 1.5 Aspek yang perlu diperhatikan dalam pemilihan program dan waktu penyelenggaraan *Program Review*

*Program Review* tidak hanya digunakan untuk mengevaluasi program, namun juga untuk kegiatan atau subkegiatan dengan pertimbangan skala kegiatan, kompleksitas informasi dan kemudahan untuk didiskusikan. Namun pertanyaannya adalah, kriteria program atau kegiatan seperti apa yang perlu dievaluasi, mengingat

setiap tahunnya ada begitu banyak program/kegiatan yang dilaksanakan pemerintah, sementara sumber daya yang ada terbatas. Untuk itu, pemerintah perlu memilih program atau kegiatan yang perlu dievaluasi dengan didasarkan atas beberapa kombinasi kriteria seperti berikut;

1. Program yang rutin diselenggarakan dalam beberapa tahun terakhir, misalnya sudah dilaksanakan selama lebih dari tiga tahun dan cenderung menjadi program rutin tanpa ada kajian terhadap keefektifitasannya.
2. Program yang masih diselenggarakan/dijalankan, dapat dievaluasi (yang dievaluasi adalah implementasi pada tahun sebelumnya).
3. Program dengan anggaran yang besar, sementara penerima manfaatnya (*beneficiaries*) cenderung terbatas. Atau program berbiaya besar, tetapi terbukti tidak mampu menciptakan perubahan yang diharapkan.
4. Program yang banyak mendapat kritikan dari masyarakat atau program yang dinilai oleh pemerintah perlu diperbaiki.
5. Program strategis pemerintah yang perlu dilihat efektivitasnya.

Kriteria-kriteria di atas digunakan sebagai dasar untuk memilih program maupun kegiatan yang akan dievaluasi, sehingga proses pemilihan dapat dipertanggungjawabkan. Namun, kriteria-kriteria tersebut tidak bersifat baku dan masih dapat dikembangkan sesuai kebutuhan dan agenda pemerintah.

Terkait waktu penyelenggaraan, *Program Review* sebaiknya diselenggarakan setelah program/kegiatan yang akan dievaluasi, selesai dijalankan/diimplementasikan. Bisa juga menyesuaikan dengan tahun anggaran pemerintah. Karena di Indonesia tahun anggaran berakhir pada bulan Desember, maka sebaiknya *Program Review* dilaksanakan pada bulan Februari-Mei. Berdasarkan uji coba yang telah dilaksanakan, idealnya

*Program Review* di tingkat kabupaten dilaksanakan selambat-lambatnya pada bulan Maret, sedangkan untuk tingkat desa selambat-lambatnya bulan Mei, sehingga hasilnya dapat menjadi bahan pertimbangan dalam proses perencanaan dan penganggaran tahun berikutnya.

Di Jepang, dalam satu hari bisa dilakukan evaluasi sampai 10 program, lima program secara paralel di dua ruang kelas berbeda. Di Indonesia berdasarkan pengalaman, satu proses evaluasi berlangsung antara 1 hingga 1,5 jam. Oleh karena itu, dalam satu hari, proses evaluasi dapat dilaksanakan terhadap beberapa program. Untuk efisiensi, dalam satu hari proses evaluasi sebaiknya dilaksanakan terhadap dua atau tiga program.

# Bab 02

Program Review  
Kalurahan Sriharjo  
Mei 2024



## 2.1 Unsur Penyelenggaraan *Program Review*

Dalam pelaksanaan *Program Review*, terdapat lima unsur yang harus ada. Tanpa adanya kelima unsur ini, *Program Review* menjadi tidak ideal.



### Panitia Pelaksana (Ideal 4-7 orang)

- Sekelompok orang yang dipilih untuk mempersiapkan dan mengorganisasi jalannya *Program Review*.
- Di tingkat desa, Panitia Pelaksana *Program Review* dapat terdiri atas unsur Badan Permusyawaratan Desa (BPD), atau gabungan BPD dan pemerintah. Ini dilakukan dengan memperhatikan peran dan fungsi BPD sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk meninjau dan mengevaluasi program-program di desa. Sementara di tingkat kabupaten, Panitia Pelaksana dapat terdiri atas unsur BAPPEDA dan instansi lain yang terkait dengan fungsi monitoring dan evaluasi program.



### Pengampu Program (Ideal 2-3 orang)

- Merupakan penanggung jawab program/kegiatan yang dievaluasi
- Bertugas untuk mempersiapkan Lembar Informasi Program (LIP), mempresentasikan program, dan menjawab pertanyaan selama jalannya *Program Review*.
- Sebaiknya yang menjadi Pengampu Program adalah individu-individu yang terlibat langsung dalam implementasi program/kegiatan sehingga mengetahui dan memahami kondisi riil secara langsung.



### Warga Penilai (Ideal 30 orang)

- Sekelompok orang yang dipilih secara acak dari populasi warga. Pemilihan secara acak menjamin semua warga memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi warga penilai.
- Bertugas untuk memberikan penilaian atas pelaksanaan program yang di-*review* dan menentukan keberlanjutan program.



### Evaluator (Ideal 2-3 orang)

- Sejumlah individu dari luar lingkungan pmda yang programnya akan dievaluasi dan tidak terlibat dalam pelaksanaan program. Evaluator bertugas untuk mendalami, mempertajam, dan menggali informasi dari Pengampu Program agar Warga Penilai dapat mengambil keputusan terhadap program yang sedang di-*review*.
- Kompetensi yang terpenting bagi evaluator adalah mereka dapat berpikir secara kritis, logis, dan objektif.



### Moderator (Ideal 1 orang)

- Individu yang dipilih untuk memandu jalannya diskusi dalam *Program Review*.
- Sebagaimana evaluator, sebaiknya moderator berasal dari luar wilayah penyelenggara sehingga diharapkan dapat memandu diskusi secara objektif.

## 2.2 Instrumen Program Review

### A. Lembar Informasi Program

Lembar Informasi Program (LIP) adalah salah satu instrumen untuk membantu Warga Penilai memahami program yang akan dievaluasi dengan baik.

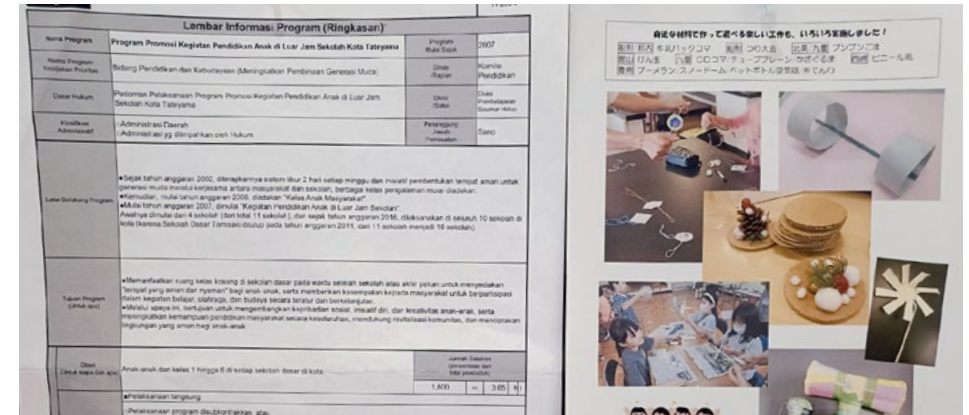
Lembar Informasi Program (LIP) berisi ringkasan informasi terperinci dari program yang dievaluasi, yaitu:

- identitas program/kegiatan yang tengah dievaluasi
- alasan dan tujuan review
- ringkasan program
- biaya
- realisasi program
- evaluasi mandiri oleh lembaga pengampu program
- referensi atas program serupa di tempat lain jika ada.

Karena ruang pada Lembar Informasi Program terbatas, maka LIP dapat dilengkapi dengan halaman lampiran. Halaman lampiran bertujuan untuk memuat informasi dan penjelasan tambahan yang dinilai penting, namun tidak cukup ruang untuk ditulis di LIP.

Lembar Informasi Program akan dipublikasikan sebelum pelaksanaan *Program Review* dan dibagikan sebelum pelaksanaan *Program Review* dimulai. LIP dibagikan kepada setiap orang yang hadir tanpa terkecuali. Agar mudah dipahami, LIP dibuat sederhana serta informatif. Data ditampilkan di LIP atau pada lampiran, dapat disusun dalam bentuk infografis yang menarik dan informatif.

Lembar Informasi Program Kalurahan Sriharjo, 2024



Lembar Informasi Program dan contoh lampiran saat pelaksanaan Program Review di salah satu kota di Jepang tahun 2024 (Kota Tateyama)

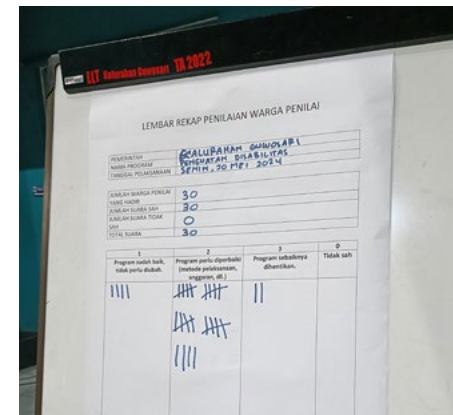
### B. Lembar Evaluasi Program

Lembar Evaluasi Program (LEP) adalah form yang digunakan oleh Warga Penilai untuk menuliskan keputusannya atas program/kegiatan yang dievaluasi, apakah perlu dilanjutkan, dilanjutkan dengan perbaikan, atau dihentikan. Lembar Evaluasi Program terdiri atas dua bagian, pertama adalah voting atas masa depan program, dan bagian kedua adalah catatan. Bagian catatan dalam LEP dapat disesuaikan form isianya sesuai dengan kebutuhan dan tujuan review.



### C. Lembar Rekap Penilaian

Lembar rekap digunakan untuk menuliskan hasil penilaian Warga Penilai ketika penghitungan secara terbuka.



File Instrumen Program Review

# Bab 03

Program Review  
Kal. Guvosari  
Mei 2024



## 3.1 Tahapan Persiapan Penyelenggaraan *Program Review*

Berikut ini adalah tahapan persiapan penyelenggaraan *Program Review* di Indonesia yang juga merupakan prasyarat pelaksanaan yang baik dan ideal.

- 1. Pembentukan Panitia Pelaksana**  
Komitmen pemerintah, baik kepala pemerintahan maupun dinas atau badan terkait lainnya, untuk melakukan *Program Review* merupakan langkah awal dan aspek terpenting. Selanjutnya pemerintah atau instansi terkait yang berniat melaksanakan *Program Review* kemudian membentuk Panitia Pelaksana.

Di tingkat desa yang telah melaksanakan *Program Review*, panitia pelaksana berasal dari gabungan unsur Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) dengan pemerintah kalurahan. Sementara di tingkat Kabupaten, Panitia Pelaksana terdiri dari gabungan unsur BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) dengan OPD (Organisasi Perangkat Desa).

Agar Panitia Pelaksana dapat menjalankan tugasnya dengan baik, maka setelah terbentuk, Panitia Pelaksana perlu

dijelaskan tentang *Program Review* serta tugas mereka mulai dari persiapan hingga pelaksanaan *Program Review*.

- 2. Pemilihan Program untuk Di-review**  
Di setiap instansi pemerintah ada banyak program/kegiatan yang dilaksanakan, sehingga tidak mungkin semuanya dievaluasi. Oleh karena itu, pemerintah perlu memilih program/kegiatan yang akan dievaluasi sesuai 5 prinsip yang sudah dijelaskan sebelumnya.
- 3. Penyusunan Lembar Informasi Program oleh Pengampu Program**  
Pengampu Program mengisi Lembar Informasi Program (LIP) sesuai realisasinya. Dalam pengisian LIP ini, mengingat warga penilai berasal dari berbagai latar belakang yang mungkin tidak familiar dengan istilah-istilah pembangunan dan birokrasi, maka Panitia Pelaksana perlu memastikan informasi yang dituliskan lengkap dan mudah dipahami. Dalam proses pengisian LIP, ketersediaan data menjadi faktor yang penting. Pengampu Program perlu mengumpulkan data-data terkait program/kegiatan sebelum proses

pengisian Lembar Informasi Program dilakukan. Apabila diperlukan, Lembar Informasi Program dapat dilengkapi dengan lampiran yang berisi foto, gambar, dan data dalam bentuk infografis yang menarik dan mudah dipahami.

- 4. Pemilihan Warga Penilai**  
Warga penilai memiliki peran yang sangat strategis dalam menentukan keberlanjutan program. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan warga penilai, yaitu:
  - a. Warga penilai dipilih secara acak untuk menghindari terjadi penilaian yang tidak objektif (warga yang dihadirkan tidak semuanya adalah pendukung pemerintah atau sebaliknya).
  - b. Jumlah Warga Penilai yang dipilih secara acak mewakili warga masyarakat berjumlah kurang lebih 30 orang, dan berusia minimal 17 tahun. Syarat usia ini dimaksudkan agar Warga Penilai yang mengikuti *Program Review* dapat mengikuti dan bertanggung jawab atas keputusan yang diambil. Batas minimum usia ini dapat diturunkan apabila program

yang dievaluasi adalah program yang memerlukan penilaian dari warga berusia anak-anak, misalnya program untuk anak sekolah atau untuk remaja. Panitia Pelaksana dapat menggunakan Daftar Pemilih Tetap (DPT) atau data warga pemilihan kepala daerah (Pilkada) sebagai basis data warga yang akan diacak.

- c. Pemilihan Warga Penilai juga dapat dilakukan dengan metode *purposive random sampling*. Tujuannya untuk melibatkan unsur-unsur khusus dalam rangka meningkatkan inklusivitas proses evaluasi seperti: perwakilan wilayah (kecamatan, desa, dusun, dll), perwakilan gender, kelompok marginal, penerima manfaat langsung dan lain-lainnya. Pemilihan tidak boleh mendiskriminasi kelompok tertentu dengan tujuan yang tidak baik. Pemilihan acak dapat dilakukan dengan menggunakan *Microsoft Excel* atau aplikasi lain.
- d. Panitia Pelaksana perlu menyiapkan cadangan kandidat Warga Penilai sebagai antisipasi apabila ada calon Warga Penilai yang menolak

berpartisipasi. Hal tersebut dikarenakan partisipasi sebagai Warga Penilai sifatnya adalah sukarela. Di tingkat desa, angka partisipasi warga lebih dari 50 persen. Namun, di tingkat kabupaten, di mana wilayah geografis secara signifikan lebih luas, secara psikologis hubungan masyarakat dengan pemerintah lebih berjarak. Penolakan warga untuk berpartisipasi sebagai Warga Penilai lebih besar karena alasan jarak atau hal lain. Oleh karenanya, Panitia Pelaksana perlu menyiapkan cadangan lebih banyak (dua kali lipat dari jumlah target Warga Penilai).

#### 5. Menghubungi Warga Penilai

Setelah kandidat Warga Penilai terpilih, Panitia Pelaksana bertanggung jawab untuk menghubungi para kandidat. Pada proses ini Panitia Pelaksana memberikan undangan dan menjelaskan maksud, tujuan, dan proses *Program Review* serta peran dan tugas Warga Penilai sehingga kandidat Warga Penilai diharapkan memahami tugasnya secara baik sebelum mengambil keputusan untuk berpartisipasi. Untuk menghubungi Warga Penilai, Panitia Pelaksana dapat mendatangi secara langsung ataupun mendelegasikan tugas kepada kantor/unit di bawahnya. Hanya saja perlu diperhatikan

dan dipastikan bahwa pihak yang diberi delegasi tugas harus memahami dan menyampaikan informasi mengenai *Program Review* kepada kandidat Warga Penilai secara lengkap, baik, dan jelas. Warga Penilai juga perlu diberi penjelasan bahwa mereka harus menghadiri sesi Penjelasan dan sesi *Program Review*.

Ketika kandidat Warga Penilai dihubungi dan menyatakan setuju untuk menjadi Warga Penilai dalam *Program Review*, petugas sebaiknya langsung mencatat beberapa informasi tentang Warga Penilai, seperti pendidikan, pekerjaan, dan menanyakan apakah mereka sudah tahu tentang program yang akan di-*review* (mengkonfirmasi data yang sudah ada pada pemerintah). Informasi ini selanjutnya diserahkan kepada Pengampu Program dan Evaluator untuk menjadi bahan dasar dalam diskusi atau dalam penggalan informasi terkait program yang di-*review*.

#### 6. Pemilihan Evaluator

Panitia Pelaksana selanjutnya perlu menentukan dan menghubungi Evaluator. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memilih Evaluator adalah:

- tidak berasal dari Dinas / OPD yang programnya akan dievaluasi sehingga diharapkan mampu membantu menggali informasi yang

- dibutuhkan secara objektif dan tidak memihak,
  - dapat berasal dari kalangan praktisi, tenaga ahli, birokrat, pengusaha ataupun akademisi,
  - tidak harus memiliki latar belakang keahlian atau pengetahuan yang selaras dengan program/kegiatan yang dievaluasi,
  - yang terpenting adalah evaluator memiliki keahlian berpikir kritis, logis, dan objektif.
- Selain itu, pemilihan evaluator sebaiknya memperhatikan aspek keterwakilan gender agar dapat memberikan perspektif yang beragam.

#### 7. Pemilihan Moderator

Moderator bertanggung jawab untuk memandu jalannya acara dan alur diskusi dalam *Program Review*. Moderator yang dipilih sebaiknya memiliki kapasitas untuk:

- mencerna informasi,
- mencerna pertanyaan dan mengartikulasikan pertanyaan yang sulit dipahami,
- objektif,
- memiliki keterampilan mengelola lalu lintas diskusi.

Fungsi dan peran moderator dapat diperluas menjadi fasilitator yang dapat mengkondisikan diskusi menjadi lebih menarik, terutama saat mendalami informasi dan data terkait substansi program. Moderator mencatat poin-

poin penting, mengkonfirmasi pernyataan dari pengampu program ataupun evaluator, serta mendistribusikan ulang poin-poin penting yang dicatatnya ke peserta, terutama pada Warga Penilai. Hal tersebut menjadikan proses *review* menjadi lebih efektif dan fokus pada substansi yang didiskusikan. Fungsi moderator tidak hanya sekadar memandu diskusi, tetapi juga menjaga kualitas dan efektivitas diskusi. Dalam konteks tersebut, moderator harus bisa memantau dinamika diskusi serta memberikan motivasi guna meningkatkan semangat seluruh unsur yang terlibat dalam pelaksanaan *Program Review*.

#### 8. Pelatihan bagi Warga Penilai

Kedudukan warga penilai sangat penting dalam *Program Review*, karena merekalah yang akan menentukan 'nasib' dari program yang di-*review*. Agar potensi kehadiran mereka dalam *Program Review* dapat dimaksimalkan, maka perlu dilatih dan diberi penjelasan mengenai *Program Review* dan tahapannya serta peran dan tugas mereka selama proses *Program Review*.

# PENGETAHUAN WARGA PENILAI TENTANG PROGRAM YANG DI-REVIEW

Ada beberapa alasan mengapa Warga Penilai perlu dilatih.

- a. Ketika tim Monitoring dan Evaluasi BSKDN (Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri) dan YNS (Yayasan Nusantara Sejati) mengikuti pelaksanaan *Program Review* di beberapa lokasi, ada kesan bahwa Warga Penilai kurang percaya diri dan ragu-ragu dalam mengemukakan pendapat atau bertanya. Oleh karena itu, dalam pelatihan/ penjelasan, Warga Penilai perlu didorong rasa percaya diri mereka serta dijelaskan juga tentang perannya.
- b. Hasil survei UNESCO pada tahun 2011 menyebutkan bahwa dari 1.000 orang penduduk Indonesia, ternyata hanya satu orang yang memiliki minat baca. Indeks minat baca di Indonesia baru mencapai 0,001 (<https://republika.co.id/berita/o6dpyg335/di-indonesia-hanya-1-dari-1000-orang-yang-serius-membaca-buku>). Berdasarkan fakta ini, maka akan lebih baik jika Warga Penilai dilatih dan dijelaskan secara langsung daripada sekadar diberikan LIP untuk mereka baca dan pahami.
- c. Pelatihan/penjelasan kepada Warga Penilai ini menjadi penting, karena tidak semua Warga Penilai yang terpilih bisa membaca.
- d. Dari hasil survei, terlihat bahwa lebih banyak Warga Penilai mengatakan bahwa mereka sebelumnya tidak tahu tentang program yang akan di-review, dan baru mengetahuinya ketika dipilih menjadi Warga Penilai, kemudian diberi sosialisasi atau pelatihan.
- e. Waktu pelaksanaan pelatihan/ penjelasan perlu memilih waktu yang tepat agar semua Warga Penilai bisa mengikutinya. Pelatihan yang diberikan kepada Warga Penilai idealnya tidak diberikan pada hari-H pelaksanaan *Program Review*, paling tidak mendekati hari pelaksanaan agar mereka memiliki waktu untuk lebih mendalami materi yang diberikan saat pelatihan. Namun, jika terdapat beberapa kondisi yang menyulitkan untuk dilakukan demikian, maka pelatihan Warga Penilai dapat dilakukan pada hari yang sama sesaat sebelum *Program Review*. Dengan memperhatikan kondisi geografis dan keterbatasan

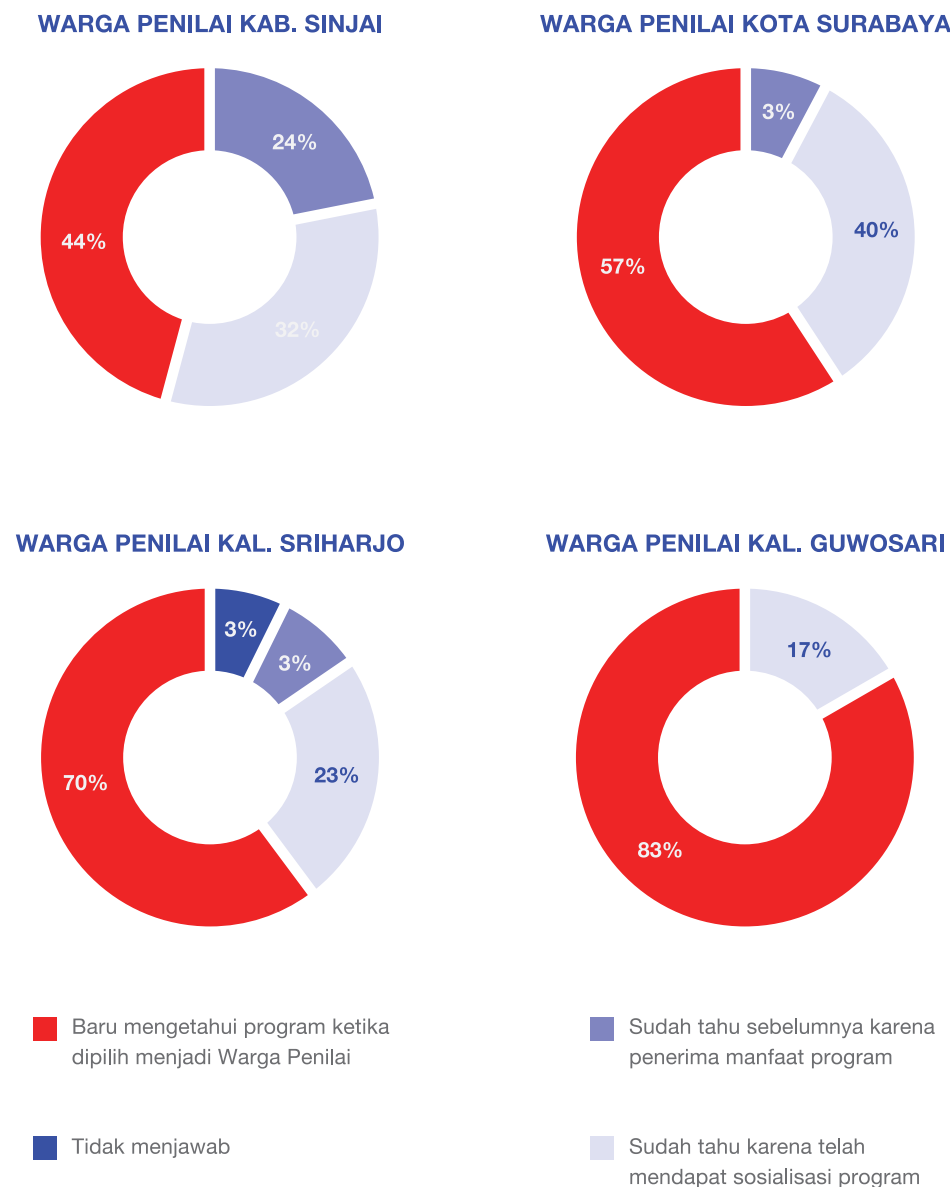


Diagram 3. Pengetahuan WP tentang Program yang Dievaluasi



waktu Warga Penilai, pelaksanaan pelatihan dapat diatur untuk memaksimalkan potensi kehadiran mereka. Dari sisi waktu, Warga Penilai tentu memiliki pekerjaan utama yang harus dihadiri. Mengajukan izin kerja sebanyak dua hari untuk mengikuti sesi Penjelasan dan sesi *Program Review* tentu menjadi tantangan. Salah satu alternatif yang dapat dilaksanakan adalah menyelenggarakan sesi Penjelasan secara langsung sebelum sesi *Program Review*. Dengan catatan, Lembar Informasi Program dikirimkan terlebih dahulu kepada Warga Penilai.

- f. Selain pelatihan atau penjelasan program, warga penilai dibagikan Lembar Informasi Program dan Lembar Evaluasi Program. Panitia Pelaksana menjelaskan masing-masing lembar, cara membaca Lembar Informasi Program, dan termasuk cara mengisi Lembar Evaluasi Program. Pembagian Lembar Informasi Program ini bertujuan agar Warga Penilai dapat mempelajarinya lebih awal sebelum dilaksanakannya *Program Review*.

## 9. Sesi Penjelasan bagi

### Evaluator dan Moderator

Sesi Penjelasan ini ditujukan untuk memberikan pemahaman kepada Evaluator dan Moderator mengenai *Program Review* dan peran yang masing-masing harus lakukan pada saat *review*. Penjelasan yang perlu disampaikan antara lain, susunan acara *Program Review* termasuk detail alokasi waktu, unsur-unsur yang akan terlibat dalam *Program Review*, peran Evaluator, dan peran Moderator. Hal yang perlu diperhatikan dalam sesi penjelasan ini:

- a. Evaluator berfungsi menggali informasi, bukan sebagai penilai. Evaluator perlu menahan diri untuk tidak menyampaikan opininya terlalu panjang.
- b. Panitia perlu menjelaskan latar belakang Warga Penilai (pendidikan, pekerjaan, dll). Informasi ini diharapkan dapat membantu Evaluator dan Moderator untuk menyesuaikan tingkat kesulitan bahasa yang digunakan dalam bertanya atau menjelaskan sesuatu.
- c. Sesi Penjelasan sebaiknya dilakukan secara langsung atau luring sehingga terjadi

interaksi dan perkenalan antara Panitia Pelaksana, Evaluator, dan Moderator. Apabila pertemuan secara langsung tidak dapat dilakukan karena alasan Evaluator mungkin berasal dari wilayah yang jauh dan memiliki kesibukan yang padat, maka pertemuan dapat dilakukan secara daring/*online*. Namun, ini sebaiknya menjadi alternatif terakhir.

- d. Hal penting lain yang perlu dilaksanakan adalah kunjungan langsung (*survei*) oleh Evaluator dan Moderator ke lokasi program/kegiatan. Hal ini untuk meningkatkan pemahaman Evaluator dan Moderator mengenai program yang dievaluasi.
- e. Untuk Moderator, perlu disampaikan perannya dalam mengorganisir proses diskusi yang terjadi dalam *Program Review*. Moderator perlu untuk memastikan proses diskusi berjalan dengan dinamis dan pertanyaan-pertanyaan dapat dijawab oleh Pengampu Program dengan baik. Moderator berhak untuk memotong pertanyaan ataupun pernyataan yang terlalu panjang. Moderator bersama Panitia Pelaksana

juga bertanggung jawab untuk memutuskan apabila waktu diskusi perlu diperpanjang ketika memang ada banyak hal yang perlu didiskusikan, atau banyak pertanyaan yang ingin diajukan baik oleh Evaluator maupun Warga Penilai.

## 10. Publikasi Mengenai *Program Review* dan Lembar Informasi Program kepada Publik

Informasi mengenai pelaksanaan *Program Review* perlu untuk diketahui oleh pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam *Program Review*, aparat pemerintah yang tidak terlibat, serta yang paling penting masyarakat umum. Sehingga Panitia Pelaksana perlu untuk mempublikasikan informasi mengenai pelaksanaan *Program Review* secara terbuka termasuk Lembar Informasi Program yang akan digunakan, agar dapat diakses oleh masyarakat. Masyarakat yang ingin menyaksikan *Program Review* juga dapat hadir. Pemerintah bisa mensosialisasikan pelaksanaan *Program Review* melalui kanal-kanal berita *online*, radio, surat kabar, sosial media, dll. Pada saat pelaksanaan *Program Review*, pemerintah juga bisa bekerja sama dengan Kominfo (Kementerian Komunikasi dan Informatika)

agar pelaksanaan dapat disiarkan secara daring atau *online* sehingga bisa disaksikan secara lebih luas.

### 11. Gladi Bersih

Gladi bersih perlu dilakukan untuk memastikan bahwa masing-masing unsur yang terlibat paham akan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Dalam Gladi Bersih, ada beberapa hal yang perlu dilakukan:

- a. Latihan bagi Pengampu Program, khususnya pemaparan tentang program yang akan di-*review*.
- b. Memastikan bahwa seluruh peralatan, instrumen, serta peralatan siap untuk digunakan (*sound system*, *timer*, *screen*, alat tulis, form/lembar LIP, LEP, Lembar Rekapitulasi, absensi, dll).

### 12. Pelaksanaan Program Review

Pelaksanaan *Program Review* perlu mempertimbangkan pemilihan waktu yang paling bersahabat bagi kandidat Warga Penilai sehingga mereka dapat hadir dan berpartisipasi dalam *Program Review*. Pemilihan waktu perlu mempertimbangkan apakah pada hari kerja atau hari libur, apakah pada pagi, siang, sore, atau malam hari. Semua pilihan tersebut memiliki konsekuensi kelebihan dan kekurangannya masing-masing yang harus dipertimbangkan

matang-matang. Misalnya, jika kegiatan dilaksanakan di malam hari, biasanya ini menyulitkan partisipasi perempuan khususnya ibu-ibu yang memiliki anak kecil. Belum lagi jika jarak lokasi kegiatan dengan rumah jauh atau jalanan yang kurang aman bagi perempuan. Sebaliknya, jika kegiatan dilaksanakan pada siang hari, biasanya warga yang memiliki pekerjaan formal akan sulit berpartisipasi karena kesulitan meminta izin kepada pemberi kerja. Atau untuk pekerja harian, meninggalkan pekerjaan mereka akan menyebabkan kehilangan penghasilan mereka.

### 13. Pasca Program Review

Pelaksanaan *Program Review* bukanlah akhir, namun menjadi awal baru dari program yang dievaluasi. Setelah pelaksanaan *Program Review*, Panitia Pelaksana bertanggung jawab untuk membuat daftar atau rekap atas hasil perhitungan suara dan masukan-masukan yang dituliskan oleh Warga Penilai. Daftar ini kemudian menjadi bagian dari laporan *Program Review* yang diserahkan kepada pemangku kepentingan seperti kepala pemerintah atau kepala dinas/badan terkait, pengampu program, organisasi pengampu program, atau instansi/unit lain yang terkait.

## 3.2 Tata Letak Program Review

Tata letak atau posisi peserta/unsur *Program Review* diatur dengan mempertimbangkan interaksi antar unsur-unsur dalam *Program Review* agar tercipta diskusi yang dinamis dan efektif. *Program Review* sebaiknya dilakukan di ruangan tertutup, tetapi jika tidak tersedia ruangan tertutup yang mampu mengakomodasi seluruh unsur yang jumlahnya bisa mencapai 50 orang serta warga/masyarakat yang ingin menyaksikan, maka kegiatan dapat dilaksanakan di ruangan semi terbuka seperti balai.

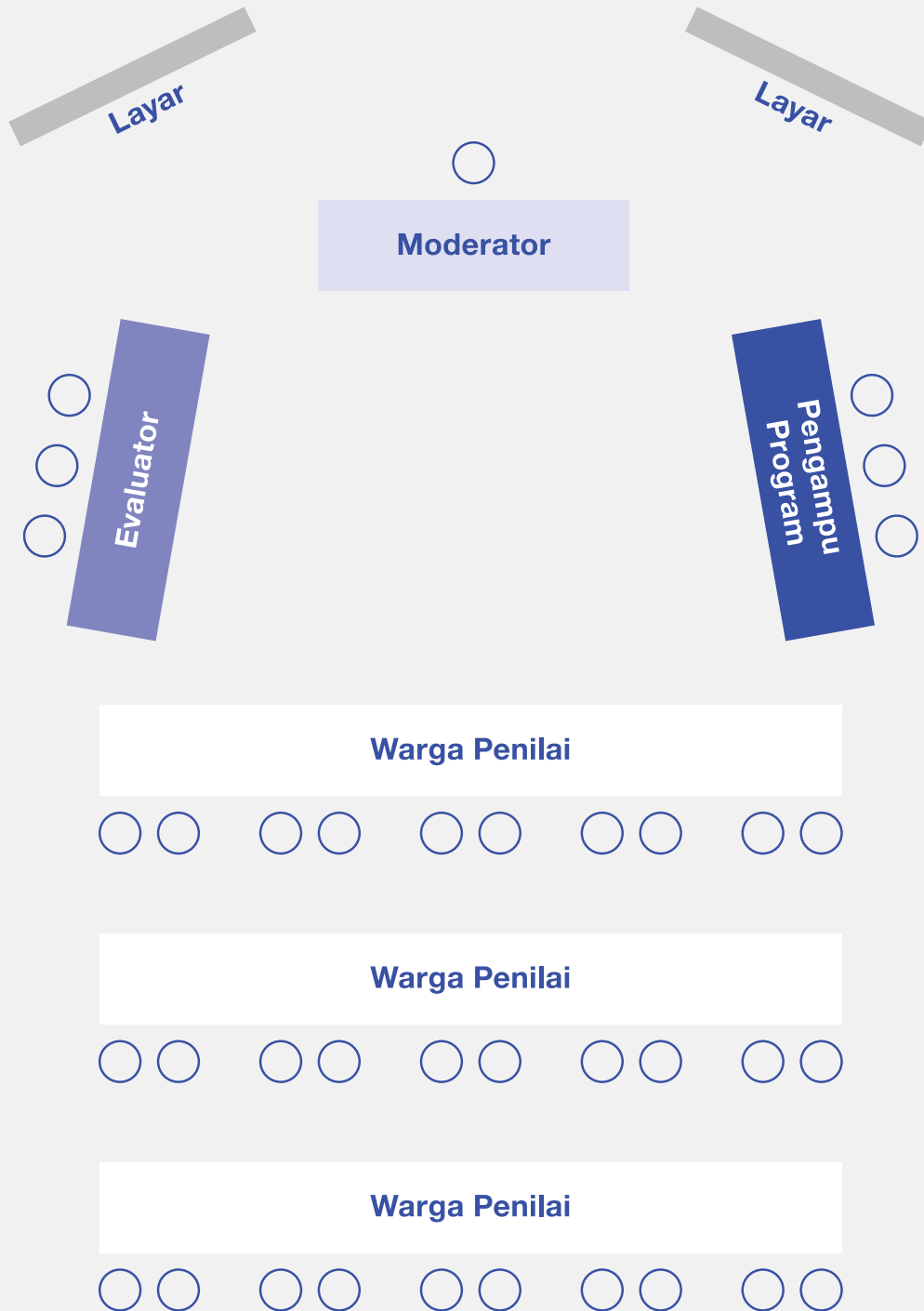
Tata letak seperti tergambar pada foto di halaman berikutnya merupakan *setting* yang digunakan untuk *Program Review* di Indonesia yang diadaptasi dari *Program Review* di Jepang dengan modifikasi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan tata letak antara lain:

1. Di bagian depan adalah Moderator, Evaluator, dan Pengampu Program sehingga memungkinkan terjadinya diskusi yang dinamis yang dapat disaksikan secara jelas oleh Warga Penilai. Tata letak ini juga memungkinkan terjadinya diskusi dan interaksi antara Warga Penilai dengan Pengampu Program.
2. Bila memungkinkan, panitia bisa menyiapkan dua layar. Layar pertama dibutuhkan jika presentasi dilakukan dengan menggunakan alat bantu PowerPoint. Apabila diputuskan penjelasan dilakukan

tanpa PowerPoint, layar tersebut tidak diperlukan. Sedangkan layar yang satu lagi digunakan untuk menampilkan waktu sehingga semua unsur yang terlibat dalam *Program Review* dapat mengetahui alokasi waktu yang telah ditempuh dan waktu yang tersisa, termasuk alokasi waktu untuk masing-masing sesi.

3. Tamu undangan maupun masyarakat yang hadir menyaksikan *Program Review* dapat diatur posisi tempat duduknya, menyesuaikan dengan ketersediaan ruangan tanpa mengubah tata letak untuk unsur-unsur di atas. Mereka yang menyaksikan *Program Review* dapat diatur tempat duduknya di belakang atau samping Warga Penilai maupun di belakang Evaluator dan Pengampu Program. Yang penting untuk diingat, perlu diberikan jarak pemisah antara tempat duduk Warga Penilai dengan tamu undangan atau warga masyarakat lainnya yang hadir agar tidak tercampur.
4. Panitia Pelaksana perlu memastikan bahwa Moderator, Evaluator, Pengampu Program, dan Warga Penilai disediakan meja karena diperlukan untuk membuat catatan. Pada masing-masing meja perlu diberikan keterangan tertulis unsur apa yang akan menempatnya: Moderator, Evaluator, Pengampu Program, atau Warga Penilai.

# Tata Letak Ruangan Program Review



Kalurahan Guwosari



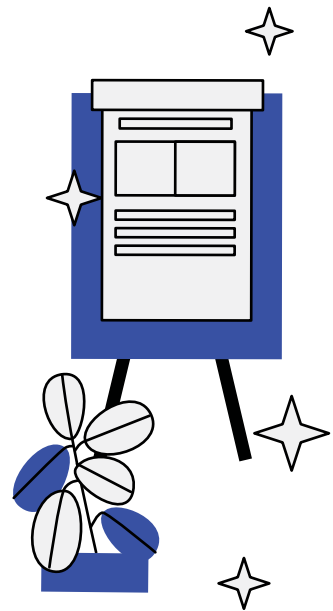
Kabupaten Sinjai



Kota Tateyama, Jepang



### 3.3 Alur Pelaksanaan Program Review



**10 Menit**

Penjelasan mengenai program atau kegiatan yang dievaluasi oleh Pengampu Program



**25 Menit\***

Diskusi antara Evaluator dengan Pengampu Program



**15 Menit\***

Tanya jawab antara Warga Penilai dengan Pengampu Program



**5 Menit**

Warga Penilai mengisi Lembar Evaluasi Program



**5 Menit**

Penghitungan hasil Lembar Evaluasi Program

#### 1. Penjelasan Program dari Pengampu Program

Program Review diawali dengan penjelasan oleh Pengampu Program tentang program/ kegiatan yang dievaluasi selama sepuluh menit dengan menekankan informasi dan poin-poin penting terkait program/ kegiatan. Pengampu Program perlu menyampaikan informasi secara singkat, padat, dan jelas serta fokus pada informasi yang belum tertulis di Lembar Informasi Program, tetapi penting untuk diketahui Warga Penilai maupun Evaluator. Jika menggunakan alat bantu presentasi berupa PowerPoint, jangan mengkopikan tulisan pada Lembar Informasi Program, tetapi tampilkan informasi visual yang membantu menjelaskan jalannya program/ kegiatan seperti foto ataupun infografik. Penggunaan alat bantu berupa PowerPoint sendiri bukan suatu keharusan. Bila penjelasan bisa disampaikan dengan lebih baik tanpa PowerPoint, maka tidak perlu menggunakannya.

#### 2. Diskusi antara Evaluator dengan Pengampu Program

Sesi dilanjutkan dengan diskusi antara Evaluator dengan Pengampu Program. Evaluator bertugas untuk menggali informasi tambahan dari Pengampu Program, mengkonfirmasi informasi

yang belum jelas, dan menegaskan informasi penting melalui diskusi dengan Pengampu Program yang akan membantu Warga Penilai dalam mengambil keputusan.

#### 3. Diskusi antara Warga Penilai dengan Pengampu Program

Sesi diskusi ini dialokasikan untuk memberikan kesempatan bagi Warga Penilai mendalami informasi atau memperoleh informasi tambahan terkait program/ kegiatan. Sesi ini berlangsung sekitar 10-15 menit, menyesuaikan dengan dinamika diskusi. Jika memang banyak warga yang ingin bertanya atau berpendapat, durasi diskusi dapat ditambah.

#### 4. Pengisian Lembar Evaluasi Program

Pasca sesi diskusi, Warga Penilai mengisi Lembar Evaluasi Program untuk memilih apakah program/ kegiatan perlu dilanjutkan, diperbaiki, atau dihentikan. Warga Penilai diberikan waktu selama lima menit untuk memilih serta menuliskan catatan terkait program yang dievaluasi. Catatan yang dituliskan dapat berkaitan dengan segala hal mengenai program, baik berupa usulan, kritikan, maupun saran. Warga Penilai dapat pula mulai mengisi bagian lembar catatan (halaman kedua Lembar Evaluasi Program) pada proses presentasi dan diskusi.

\*Durasi waktu sekitar 1-1,5 jam (dapat disesuaikan dengan kebutuhan)

### 5. Penghitungan dan Pengumuman Hasil

Panitia Pelaksana mengumpulkan Lembar Evaluasi Program yang telah diisi dan selanjutnya melakukan perhitungan secara terbuka. Penghitungan Lembar Evaluasi Program dilakukan menyerupai penghitungan hasil pemilu di depan seluruh peserta kegiatan. Hasil kemudian

diumumkan dan beberapa catatan dapat dibacakan. Pelaksanaan di Kabupaten Bantul, baik di tingkat *kalurahan* dan pemda, setelah penghitungan hasil evaluasi warga penilai, evaluator diberi kesempatan untuk menyampaikan masukan atau pendapatnya. Waktu yang disediakan 5 menit.

## Rangkuman Tahapan Pelaksanaan *Program Review*

Berikut merupakan rangkuman tahap persiapan hingga pasca *Program Review*. Daftar peran ini dapat menjadi panduan membagi tugas antar-anggota Panitia Pelaksana maupun *checklist* atas pelaksanaan tahapan persiapan.

Tahapan	Tugas	Keterangan
<b>3 bulan sebelum:</b>		
Pembentukan Panitia Pelaksana	1.a Menentukan panitia pelaksana	4-7 orang
	1.b. Menentukan hari pelaksanaan	Bila mengacu pada mudahnya warga penilai yang dipilih secara acak, lebih baik Sabtu atau Minggu. Namun untuk level <i>kalurahan</i> /desa pilihan malam di hari biasa bisa menjadi pertimbangan. Pada level kabupaten/kota, ada kemungkinan warga penilai datang dari jauh, sehingga lebih baik dilaksanakan pagi atau siang.
	1.c. Menentukan tempat pelaksanaan	Lebih baik memakai fasilitas pemda dengan peralatan <i>sound system</i> yang baik serta lokasi yang nyaman dihadiri oleh audiens. Bisa juga di tempat terbuka atau tempat yang dapat diakses dengan mudah baik dengan kendaraan pribadi maupun transportasi umum.

Tahapan	Tugas	Keterangan
<b>2 bulan sebelum:</b>		
Pemilihan program yang akan di- <i>review</i>	2.a. Menentukan program yang di- <i>review</i>	Pemilihan tergantung pada tujuan (hemat anggaran, kesempatan diklat bagi ASN, program yang mendapat banyak kritik atau untuk memperbaiki program agar ke depan lebih baik dalam teknis pelaksanaan).
Sosialisasi	3.a. Melakukan sosialisasi internal	Pemerintah Kota / Desa (Kepala Pemerintahan) dengan melibatkan Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) / BPD (Badan Permusyawaratan Desa)
		Seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah), terutama OPD Pengampu Program
		Bagian Bappeda atau OPD yang programnya akan dievaluasi
	3.b. Sosialisasi kepada Camat	Untuk warga penilai yang dipilih secara acak, undangan akan disampaikan oleh staf kecamatan sehingga sosialisasi ini sangat penting dan diperlukan.
	3.c. Memulai Sosialisasi kepada warga	Sosialisasi <i>Program Review</i> secara luas melalui kanal-kanal berita <i>online</i> , radio, surat kabar, media sosial, TV, dll.
Pengisian Lembar Informasi Program	4.a. Menghubungi unit, bagian, dinas, atau instansi terkait (Pengampu Program) rencana <i>Program Review</i>	Pengisian LIP tidak selesai dalam 1 kali, maka perlu waktu untuk memperbaiki bersama dengan panitia pelaksana/pendamping
	4.b. Memberikan penjelasan kepada Pengampu Program mengenai <i>Program Review</i>	
	4.c. Mendampingi Pengampu Program untuk mengisi LIP dan memastikan lembar tersebut terisi dengan baik	

Tahapan	Tugas	Keterangan
	4.d Menentukan Pengampu Program yang menjelaskan program yang di- <i>review</i>	Sebaiknya praktisi/orang lapangan sebanyak 1-2 orang
<b>1,5 bulan sebelum:</b>		
Pemilihan Warga Penilai	5.a. Melakukan pemilihan warga penilai secara acak	±30 orang. Idealnya bisa melakukan pemilihan warga secara terbuka dan melibatkan berbagai pihak terkait.
	5.b. Menentukan daftar warga penilai dan daftar cadangan	Perlu secepatnya menghubungi calon warga penilai untuk mengkonfirmasi kehadiran mereka dalam pelaksanaan <i>Program Review</i> . Penentuan warga penilai memakan waktu lama karena belum tentu kandidat yang dipilih bisa atau bersedia hadir sehingga bisa dipilih lebih awal dan menyiapkan daftar cadangan warga penilai.
	5.c. Menyiapkan undangan, informasi berkaitan dengan <i>Program Review</i> , dan surat pernyataan kesediaan berpartisipasi	
	5.d. Menghubungi warga penilai	
	5.e. Melakukan pencatatan atas kandidat yang bersedia dan yang tidak	
	5.f. Menentukan kandidat cadangan yang perlu dihubungi bila ada kandidat yang tidak bersedia	
	5.g. Mengorganisir sesi pelatihan bagi warga penilai	

Tahapan	Tugas	Keterangan
<b>1 bulan sebelum:</b>		
Pemilihan evaluator dan moderator	6.a. Menentukan dan menghubungi evaluator dan moderator  6.b. Mengorganisir sesi penjelasan bagi evaluator dan moderator	Bisa dipilih dari Bappeda pemerintah daerah tetangga, advokat, NGO, pengusaha, atau akademisi
<b>2 minggu sebelum:</b>		
Finalisasi LIP & Sosialisasi	7.a Melakukan finalisasi LIP  7.b Melakukan kegiatan <i>press release</i>  7.c Pelatihan untuk evaluator dan moderator	LIP yang final segera diinformasikan kepada Evaluator, Moderator, dan Warga Penilai untuk dipelajari  Sosialisasi kepada masyarakat secara luas agar <i>Program Review</i> semakin dikenal, via media sosial, radio, flyer, media <i>online</i> , TV, dll.  Idealnya dilakukan 2 kali. 1. Penjelasan <i>Program Review</i> dan poin-poin yang harus diperhatikan sebagai Evaluator dan Moderator. 2. Analisis Lembar Informasi Program (LIP) dengan kehadiran panitia pelaksana.
<b>1 minggu sebelum:</b>		
Persiapan Teknis	8.a Menyiapkan teknis siaran langsung melalui Zoom atau Youtube apabila akan disiarkan secara daring  8.b Mencetak instrumen <i>Program Review</i> dan menyiapkan berbagai kebutuhan teknis lainnya	Pada saat pelaksanaan <i>Program Review</i> , pemerintah juga bisa bekerja sama dengan Kominfo (Kementerian Komunikasi dan Informatik) agar pelaksanaan dapat disiarkan secara daring atau <i>online</i>  Panitia menyiapkan kebutuhan teknis dengan mencetak Lembar Informasi Program (LIP), Lembar Evaluasi Program (LEP), Lembar besar untuk rekapitulasi, Papan nama Moderator, Evaluator, Pemangku Program, Warga Penilai serta menyiapkan undangan, alat tulis dan kebutuhan teknis lain.

Tahapan	Tugas	Keterangan
	8.c Menentukan susunan acara	Finalisasi kebutuhan dan kesiapan pelaksana <i>Program Review</i> , juga finalisasi pengisi acara protokoler pembukaan.
	8.d Mempersiapkan ruangan (Layout) sesuai tata letak yang telah ditentukan	Idealnya posisi meja Moderator, Evaluator dan Pemangku program dapat menghadap kepada warga penilai dengan jarak maksimal 5 meter. Untuk Warga Penilai, 1 meja bisa disiapkan untuk 2 atau 3 orang.
	8.e Menentukan MC	Menentukan Pembawa Acara saat protokoler pembukaan.
	8.f Kunjungan evaluator dan moderator ke lokasi program yang akan di-review	Bila memungkinkan bisa dilaksanakan di 1 minggu sebelum atau 1 hari sebelum pelaksanaan <i>Program Review</i> .
	8.g Pelatihan untuk Warga Penilai	Idealnya diberikan sebelum hari-H pelaksanaan <i>Program Review</i> . Namun, jika terdapat beberapa kondisi yang menyulitkan, maka dapat memilih opsi untuk dilakukan pada hari yang sama sesaat sebelum <i>Program Review</i> , dengan catatan, Lembar Informasi Program (LIP) dikirimkan terlebih dahulu kepada Warga Penilai.
<b>1 hari sebelum:</b>		
Gladi bersih	9.a Latihan pemaparan pemangku program	Pemaparan bisa dilakukan dengan LIP saja. Pengampu Program diharapkan bisa memaparkan dalam 10 menit dengan kata-kata sederhana agar warga yang bukan orang pemerintahan bisa memahaminya.
	9.b Mempersiapkan berbagai peralatan teknis yang diperlukan	Sebaiknya <i>timer</i> dipasang di lokasi yang mudah dilihat oleh Moderator (akan lebih baik bila bisa berbunyi). Cek sound (perlu minimal 3 mic) Berkoordinasi dengan Kominfo untuk menyiapkan perlengkapan untuk merekam

Tahapan	Tugas	Keterangan
	9.c Memastikan pembagian peran Panitia Pelaksana	Peran saat pelaksanaan <i>Program Review</i> : menerima warga penilai/ tamu, mengumpulkan Lembar Evaluasi Program (LEP), menghitung rekapitulasi hasil evaluasi dari warga penilai, menjaga alokasi waktu ( <i>timer</i> ).
<i>Program Review</i>	10.a Memastikan kehadiran seluruh unsur <i>Program Review</i> hadir beserta dengan undangan lainnya	Seluruh unsur menempati sesuai papan nama. Perlu memastikan undangan lain misalnya dari media (perlu dipastikan sebelum pelaksanaan)
	10.b Membagikan instrumen kepada Warga Penilai	Lembar Informasi Program (LIP) dan Lembar Evaluasi Program (LEP)
	10.c Membagikan LIP kepada seluruh peserta yang hadir	
	10.d Menjaga alokasi waktu ( <i>timer</i> )	Panitia Pelaksana perlu memastikan pelaksanaan sesuai dengan susunan acara yang telah disiapkan
	10.e Menghitung hasil Lembar Evaluasi Program	Mengumpulkan Lembar Evaluasi Program yang telah diisi, menghitung hasil dan mengumumkannya
	10.f Mendokumentasikan pelaksanaan <i>Program Review</i> dalam bentuk foto dan video	Perlu memastikan apabila ditayangkan secara <i>live streaming</i>
<b>1 minggu - 1 bulan setelah pelaksanaan:</b>		
<i>Pasca Program Review</i>	11.a Melakukan evaluasi pelaksanaan <i>Program Review</i>	Evaluasi menjadi masukan untuk penyelenggaraan tahun berikutnya.
	11.b Menyusun laporan pelaksanaan <i>Program Review</i>	
	11.c Menyerahkan rekap hasil dan laporan kepada pemangku kepentingan (pimpinan pemerintah daerah, pengampu program, DPRD, dll)	Dilakukan oleh Pemangku Program bersama Bappeda / BPD atau disesuaikan dengan tingkat pemerintahan pelaksanaannya

# Bab 04

Program Review  
Kabupaten Sinjai  
Mei 2024





## 4.1 Cerita Perubahan

“ Program Review menjadi semacam alarm pengingat pada pemerintah agar lebih disiplin menjalankan program/kegiatan sesuai dengan rencana induk atau renstra yang sudah disusun. ”

Di Jepang, tidak ada regulasi yang mengharuskan pemerintah untuk mengikuti atau menindaklanjuti hasil dari *Program Review*. Meski demikian, pemerintah berkomitmen untuk menindaklanjuti keputusan keputusan yang dihasilkan dari *Program Review* sebagai tanggung jawab terhadap proses evaluasi yang dijalankan secara transparan bersama masyarakat. Tindak lanjut yang diambil merupakan wujud akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat.

Sementara itu di Indonesia, saat ini belum ada regulasi yang secara khusus mengatur mekanisme pelaksanaan *Program Review* serta tindak lanjut yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah yang melaksanakannya. Namun demikian, sebagai komitmen untuk mewujudkan mekanisme evaluasi yang lebih partisipatif, Pemerintah *Kalurahan Sriharjo* dan *Kalurahan Guwosari* telah menerbitkan peraturan lurah yang menetapkan

pelaksanaan *Program Review* berbasis partisipasi masyarakat. Ketetapan tersebut dimuat dalam Peraturan Lurah Sriharjo Nomor 02 tahun 2023 tentang Pelaksanaan Evaluasi Program Berbasis Masyarakat Melalui *Program Review* (<https://sriharjo.bantulkab.go.id/assets/files/dokumen/SalinanPerlurno02th2023ttgProgramReview.pdf>) dan Peraturan Lurah Guwosari Nomor 01 tahun 2023 tentang Pelaksanaan *Program Review* Pembangunan *Kalurahan* Berbasis Partisipasi Masyarakat (<https://jdih.bantulkab.go.id/produkhukumkalurahan/detail/356/peraturan-lurah-guwosari-tahun-2023-nomor-1.html>).

Tabel di bawah ini menunjukkan gambaran cerita perubahan, sebelum dan setelah pelaksanaan *Program Review*, di *Kalurahan Sriharjo*, *Kalurahan Guwosari*, Kabupaten Bantul, dan Kota Surabaya.



Alasan Program Dipilih untuk Di-review	Sebelum Program Review	Perubahan yang terjadi
<b>Kalurahan Sriharjo, 2022</b>		
<b>Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk Balita Stunting</b>		
Tingginya angka <i>stunting</i> di <i>kalurahan</i> ini (28 dari 548 balita, data tahun 2021), serta kurangnya penyesuaian bantuan dengan kondisi spesifik masing-masing balita.	Program PMT berfokus pada distribusi makanan tambahan secara merata, tanpa mempertimbangkan kondisi spesifik balita (anggaran per anak Rp17.500 per paket, terdiri dari nasi, sayur, lauk nabati/hewani, buah, dan biskuit sehat.)	Pemerintah <i>Kalurahan Sriharjo</i> kini memberikan bantuan PMT berdasarkan hasil konseling dan pemeriksaan oleh dokter spesialis anak, dengan alokasi anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan balita <i>stunting</i> . Bersama kader Posyandu, pemerintahan <i>kalurahan</i> melakukan <i>assessment</i> kemampuan ekonomi keluarga balita yang mengalami <i>stunting</i> . Hasil <i>assessment</i> tersebut akan menentukan apakah balita <i>stunting</i> akan mendapatkan bantuan anggaran dari pemerintah <i>kalurahan</i> atau tidak.

Alasan Program Dipilih untuk Di-review	Sebelum Program Review	Perubahan yang terjadi
<b>Kalurahan Guwosari, 2022 Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)</b>		
Keluhan dari warga mengenai biaya swadaya yang dianggap memberatkan dan tidak sepadan dengan anggaran yang diberikan oleh pemerintah <i>kalurahan</i> (Rp18.025.000) untuk pembelian material, sehingga beberapa warga yang layak menerima bantuan tidak bisa ikut serta dalam program.	Penetapan penerima manfaat melalui survei lokasi oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), namun biaya swadaya yang dirasa berat menyebabkan warga yang layak tidak dapat berpartisipasi.	Setelah <i>review</i> , dilakukan <i>assessment</i> mendalam untuk mengklasifikasi tingkat kerusakan rumah.  1. Jika tingkat kerusakan ringan, biaya RTLH akan dibebankan pada anggaran <i>kalurahan</i> sebesar Rp. 10.000.000.  2. Jika tingkat kerusakan sedang - ringan sampai sedang - berat, anggaran akan dibebankan pada APBD dengan besar anggaran Rp. 17.500.000,- dan APBN (anggaran dari Kementerian PUPR) dengan besar anggaran Rp. 35.000.000,-.  3. Jika tingkat kerusakan berat, biaya RTLH akan dibebankan pada APBD Provinsi sebesar Rp. 50.000.000 Pemerintah <i>kalurahan</i> juga mendorong gotong royong di tingkat RT untuk meringankan beban swadaya.

Alasan Program Dipilih untuk Di-review	Sebelum Program Review	Perubahan yang terjadi
<b>Kabupaten Bantul, 2023 Pajak Award</b>		
Evaluasi untuk mengetahui relevansi Pajak Award dalam meningkatkan ketaatan warga dalam membayar pajak serta efektivitas anggaran yang digunakan.	Belum terlihat relevansi Pajak Award dengan peningkatan ketaatan warga dalam membayar pajak	Pemerintah berencana untuk membuat desain kegiatan Pajak Award yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu kegiatan yang dapat menyentuh semua sektor: pariwisata, pendidikan, kebudayaan serta kesehatan, dan bisa meningkatkan pendapatan serta kesadaran warga akan pentingnya pembayaran pajak secara lebih terukur. Namun karena desain tersebut belum ada sehingga pada tahun 2024 kegiatan Pajak Award ditiadakan.
<b>Kabupaten Bantul, 2023 Program Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)</b>		
Ketidakmerataan pelayanan penerangan jalan	Dari tahun ke tahun anggaran yang dialokasikan cukup besar. Untuk program ini sebenarnya Dinas Perhubungan sudah memiliki <i>master plan</i> dan rencana prioritas pembangunan penerangan jalan, namun <i>master plan</i> yang ada belum dapat direalisasikan dengan baik dan disiplin.	Perbaikan yang dilakukan Dinas Perhubungan merespons hasil <i>review</i> adalah dengan menggunakan <i>master plan</i> sebagai acuan dalam pemasangan LPJU. Usulan dari anggota dewan melalui pokok-pokok pikiran yang disampaikan kepada Dinas Perhubungan serta usulan yang disampaikan masyarakat oleh Dinas Perhubungan ditindaklanjuti berdasarkan <i>master plan</i> yang ada.

Alasan Program Dipilih untuk Di-review	Sebelum Program Review	Perubahan yang terjadi
<b>Kota Surabaya, 2023</b>		
<b>Pemberian Makanan pada Lansia, Yatim Piatu, dan Penyandang Disabilitas</b>		
Program permakanaan dinilai kurang efisien karena adanya tumpang tindih dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari pemerintah pusat, yang menyebabkan redundansi dalam bantuan sosial.	Program berfokus pada distribusi makanan harian kepada penerima manfaat, namun ditemukan kurang efisien karena tumpang tindih dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT).	Program permakanaan ditiadakan pada 2024 dan digantikan sepenuhnya oleh BLT yang lebih efisien, sesuai dengan evaluasi yang menunjukkan redundansi antara bantuan permakanaan dan BLT.
<b>Kalurahan Sriharjo, 2023</b>		
<b>Pengelolaan Foodcourt Srikeminut</b>		
Kunjungan wisatawan belum meningkat secara signifikan, sehingga perlu evaluasi untuk meningkatkan daya tarik kawasan wisata.	Jumlah kunjungan wisatawan belum bertambah signifikan setelah pembangunan.	Pemerintah <i>kalurahan</i> mengalokasikan promosi wisata salah satunya adalah Sriharjo Fun Trail Run yang akan diselenggarakan setiap tahun, serta upaya memperkuat kelembagaan pengelola wisata dengan memberikan anggaran operasional kepada Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) serta peningkatan kapasitas pengelola wisata untuk membuat paket wisata di Srikeminut
<b>Kalurahan Sriharjo, 2023</b>		
<b>Fasilitas Peringatan Hari Jadi Kalurahan Sriharjo</b>		
Dipilih karena kegiatan ini melibatkan hampir semua komponen masyarakat, namun pelaksanaan peringatan masih menghadapi masalah, terutama terkait dengan manajemen acara dan keterlibatan masyarakat	Kekacauan saat kegiatan Kenduri Ageng, pelaksanaan kurang lancar.	Perubahan skema kegiatan yaitu dalam satu hari diadakan satu event kegiatan, dan penambahan keterlibatan unsur masyarakat dalam kepanitiaan Peringatan Hari Jadi.

Alasan Program Dipilih untuk Di-review	Sebelum Program Review	Perubahan yang terjadi
<b>Kalurahan Guwosari, 2023</b>		
<b>Pendampingan Ibu Hamil Berisiko Tinggi</b>		
Peningkatan jumlah ibu hamil berisiko tinggi, beberapa kasus kematian ibu hamil	Data Puskesmas Tahun 2021 sebanyak 29 orang ibu hamil berisiko tinggi dan pada tahun 2022 sebanyak 39 orang. Kasus kematian ibu hamil sebanyak 2 orang pada tahun 2021	Kerjasama dengan Puskesmas, pemberian PMT selama 120 hari, dan kelas ibu hamil dengan bidan desa.
<b>Kalurahan Guwosari, 2023</b>		
<b>Layanan Pengelolaan dan Pengolahan Sampah</b>		
Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Regional Piyungan sudah tidak beroperasi	<i>Kalurahan</i> Guwosari saat ini sudah memiliki tempat pengelolaan dan pengolahan sampah, namun daya jangkauannya masih terbatas.	Badan Usaha Milik <i>Kalurahan</i> (BUMKal) Guwosari menggenjarkan sosialisasi cara memilah sampah rumah tangga. Kegiatan sosialisasi dilakukan berdasar pada kesiapan warga untuk mendapatkan sosialisasi dari BUMKal. Selain itu BUMKal menjadi lebih intens mengadakan pertemuan dengan para agen dalam rangka meningkatkan layanan pada masyarakat.

Setidaknya ada tiga hal yang bisa disimpulkan dari gambaran di atas. *Pertama*, pelaksanaan *Program Review* telah mendorong adanya inovasi dan perbaikan. Meskipun perubahan yang dilakukan tidak semuanya menyentuh aspek fundamental dan menjawab alasan serta tujuan dilakukannya *review*. *Kedua*, pemerintah menjadi lebih hati-hati dalam merencanakan suatu program/kegiatan. Hal tersebut misalnya dapat dilihat dari tindak lanjut yang dilakukan oleh pemerintah *kalurahan* dalam memperbaiki program

RTLH dan Pajak Award di tingkat kabupaten. Tahap perencanaan yang kadang disusun hanya dengan merujuk pada dokumen tahun-tahun sebelumnya setelah dilakukan *review* disusun dengan lebih baik dan matang. *Ketiga*, *Program Review* menjadi semacam alarm pengingat pada pemerintah agar lebih disiplin menjalankan program/kegiatan sesuai dengan rencana induk atau renstra yang sudah disusun. Hal tersebut dapat dilihat, misalnya, dari respon Dishub Kabupaten Bantul setelah dilakukan *review* program LPJU.

## 4.2 Kendala dan Tantangan Pelaksanaan *Program Review*

Pelaksanaan *Program Review* tentu tidak lepas dari kendala dan tantangan, baik pada tahap persiapan maupun pasca pelaksanaan *review*. Berikut ini adalah kendala dan tantangan yang dihadapi:

- **Kepemimpinan**

Pada awalnya, *Program Review* dilihat negatif dan unsur penolakannya kuat. Hal ini karena sebagian Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan perangkat *Kalurahan* melihat kata evaluasi sebagai upaya untuk blejeti (mengkritisi secara terbuka) Pengampu Program di hadapan publik. Pada sisi lain, secara internal OPD telah

memiliki mekanisme monitoring dan evaluasi sehingga *Program Review* hanya dipandang sebagai kegiatan yang hanya menambah beban pekerjaan. Dalam pengalaman pelaksanaan *Program Review*, masalah di atas dapat diatasi dengan sikap pemimpin yang terus mendorong, menyadarkan dan meyakinkan OPD bahwa *Program Review* dilakukan bukan untuk menggali kejelekan atau sebagai upaya menjatuhkan namun sebaliknya untuk menemukan langkah-langkah serta ide-ide yang bisa dilakukan untuk perbaikan program-program yang sudah dilaksanakan.



Peran pemimpin ini juga sangat krusial dalam memastikan bahwa OPD menindaklanjuti hasil Evaluasi Program dengan sungguh-sungguh.

- **Penentuan Program yang akan Di-review**

Di tingkat *kalurahan* meskipun otoritas pembentukan panitia pelaksana dipegang oleh Bamuskal/BPD, namun dalam menentukan program yang akan dievaluasi Bamuskal/BPD sebaiknya berdiskusi terlebih dahulu dengan lurah. Hal tersebut terutama untuk menghindari ketegangan yang tidak produktif dan tidak perlu antara lurah

beserta perangkat *kalurahan* dengan Bamuskal/BPD. Dalam menentukan program yang hendak dievaluasi menjadi semakin kuat lagi jika ada keterlibatan masyarakat. Secara teknis bisa dilakukan dengan cara, Bamuskal bersama lurah membuat daftar prioritas program yang akan dievaluasi, lalu masyarakat diajak untuk menentukan program prioritas yang dievaluasi. Pada tingkat kabupaten penentuan daftar prioritas program yang akan di-review dilakukan oleh Bappeda. Dari daftar prioritas tersebut Bappeda akan berkonsultasi dengan bupati untuk memastikan program yang akan di-review. Pada fase penentuan program ini

kadang bupati memiliki pandangan berbeda dengan Bappeda sehingga perlu dilakukan diskusi-diskusi untuk menemukan program yang akan di-*review*. Kadang, ketika program yang akan di-*review* sudah diputuskan, OPD pengampu program tidak bisa menerima keputusan yang sudah diambil sehingga harus dilakukan pendekatan dan komunikasi yang lebih intens agar OPD pengampu bersedia programnya di-*review*.

- **Pengisian Lembar Informasi Program**

Pengisian Lembar Informasi Program (LIP) dilakukan oleh OPD atau perangkat *kalurahan* yang programnya hendak di-*review*. Pengisian LIP ini menjadi salah satu tahapan krusial yang perlu mendapatkan perhatian khusus, karena LIP adalah instrumen utama yang digunakan oleh evaluator dan warga penilai untuk mengenali dan memahami program yang di-*review*. Kendala yang dihadapi dalam pengisian LIP adalah ketersediaan data. Misalnya ketika mengisi bagian capaian program, ternyata ada pengampu program yang tidak memiliki catatan dan dokumentasi capaian-capaian

program yang diampu. Dengan demikian pada fase ini akan terlihat sejauh mana pengetahuan dan penguasaan para pengampu program tersebut terhadap program yang diampu, serta keseriusan pengampu program bertanggungjawab melaksanakan program yang diampu.

- **Warga Penilai**

Dalam pelaksanaan *Program Review* di dua *kalurahan*, ada dua eksperimentasi cara pemilihan yang pernah dilakukan. Dalam pelaksanaan *Program Review* tahun 2022, warga penilai yang berjumlah 30 orang 50 persennya dipilih dari warga yang aktif dalam kelembagaan desa dan 50 persen lainnya dipilih secara acak. Pada pelaksanaan tahun 2023, 100 persen warga penilai dipilih secara acak dari data penduduk yang ada, dengan persentase khusus diberikan bagi penyandang disabilitas. Perbedaan mendasar yang ditemukan dengan cara pemilihan yang berbeda tersebut adalah warga yang berlatar belakang aktif di lembaga-lembaga desa perspektif pemikirannya sudah terbatas oleh 'bisnis yang selama

ini berlangsung' atau tidak *out of the box* alias kurang berani mengusulkan inovasi. Temuan lain, dari 15 warga penilai yang tidak aktif di lembaga-lembaga desa ternyata sebagian besar tidak pernah bersentuhan dengan pemerintahan *kalurahan* dan program-program yang dilaksanakan *kalurahan*. Jadi, kalau *Program Review* hendak digunakan sebagai media mendorong partisipasi masyarakat dan meningkatkan akuntabilitas sosial, pemilihan warga penilai dengan 100 persen acak merupakan pilihan yang paling baik. Pilihan 100 persen acak tersebut sekaligus mempertegas bahwa semua warga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan informasi dan mengevaluasi program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Agar warga penilai memiliki bekal pengetahuan tentang program yang akan di-*review* dan memahami tugasnya dalam pelaksanaan *Program Review* yang penting dilakukan adalah diadakannya sesi khusus *briefing* kepada warga penilai beberapa hari sebelum pelaksanaan *Program Review*. Pemberian jeda

waktu beberapa hari tersebut dimaksudkan agar warga penilai memiliki waktu cukup longgar untuk menggali informasi program yang akan di-*review* dari berbagai sumber seperti internet, bertanya pada saudara, teman dan tetangga tentang program yang akan di-*review*.

- **Evaluator dan Moderator**

Untuk menambah pemahaman evaluator dan moderator terhadap program yang akan di-*review* sebaiknya moderator dan evaluator tidak hanya mendapatkan penjelasan tentang program melalui forum diskusi, namun juga mengunjungi lokasi pelaksanaan dan penerima manfaat program. Berdasarkan pengalaman mempersiapkan *Program Review* di Bantul, moderator dan evaluator yang mengunjungi lokasi program dan berdiskusi dengan penerima manfaat memiliki bekal yang lebih komplit ketika mengkritisi program yang di-*review*. Pertanyaan yang diajukan lebih tajam dan usulan rekomendasi yang disampaikan terhubung dengan fakta yang terjadi.

# Bab 05

Program Review  
Kota Surabaya  
Juni 2024



## Pembiayaan *Program Review*

Selain hal-hal yang sudah diuraikan di bab-bab sebelumnya, pertanyaan penting yang sering diajukan adalah “Berapa besar biaya penyelenggaraan *Program Review*?” Dari mana biayanya? Apakah biaya penyelenggaraan langsung ditanggung oleh OPD bersangkutan?

Meskipun dapat dilakukan secara sederhana, pelaksanaan *Program Review* juga membutuhkan biaya. *Program Review* memiliki keunggulan karena dapat dilakukan secara sederhana selama ada ruang yang mencukupi seperti ruang rapat atau meminjam ruang kelas sekolah. Sangat disarankan agar penyelenggaraan *Program Review* dilakukan dengan sederhana agar membantu penghematan anggaran pemerintah dan meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran, bukan malah menjadi sumber pemborosan baru.

Bila mengacu pada pelaksanaan *Program Review* di Jepang, umumnya penyelenggaraannya dilakukan secara sederhana. Secara umum, tidak ada hal yang secara substansial berbeda dari rangkaian pelaksanaan Evaluasi Program baik di Jepang maupun di Indonesia. Perbedaannya mungkin pada budaya Jepang dan Indonesia. Di Jepang, penyelenggaraan *Program Review* tidak ada seremonial yang terlalu kaku, sekalipun pada acara tersebut hadir Walikota dan Wakil Walikota Tateyama dari awal sampai berakhirnya kegiatan. Selain itu, tampaknya tidak ada kebiasaan untuk menyediakan snack bagi peserta *Program Review* dan undangan.

Teknis dan tata cara pelaksanaan *Program Review* di Jepang dapat menjadi pembelajaran bagi pengembangan model *Program Review* ke depan, tentu saja tanpa mengesampingkan konteks lokalitas di masing-masing wilayah di Indonesia. Ruang improvisasi tidak dibatasi sepanjang pelaksanaannya sesuai dengan prinsip dasar pelaksanaan *Program Review*, yaitu diskusi berbasis program, diskusi melalui lembar program, diskusi dengan pihak luar, diskusi secara terbuka, dan diskusi dengan hasil yang jelas.



Suasana Pelaksanaan *Program Review* di Kota Tateyama, Jepang, Agustus 2024

Berdasarkan pengalaman pelaksanaan *Program Review* di Indonesia, biaya pelaksanaannya berkisar antara 30 – 40 juta Rupiah. Biaya tersebut meliputi item pembiayaan:

1. Biaya Rapat
2. Honor Evaluator & Moderator
3. Biaya Transport Warga Penilai
4. Akomodasi dan Transportasi bagi unsur *Program Review* yang berasal dari luar daerah
5. Biaya Sosialisasi (Brosur, Media Sosial, dll)
6. ATK, Print, Foto Copy

Dalam pengalaman mengikuti penyelenggaraan *Program Review* di beberapa lokasi, ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menekan biaya penyelenggaraan *Program Review*. Hal-hal tersebut antara lain:

1. Evaluator sebaiknya didatangkan dari kota/kabupaten atau desa tetangga sehingga bisa meminimalisir biaya transportasi maupun akomodasi
2. Konsep acara yang sederhana, tanpa acara seremonial yang besar, tentunya bisa membuat anggaran penyelenggaraan tidak bertambah besar.
3. Panitia pelaksana juga bisa menyiapkan snack, makanan dan minuman yang layak namun tetap bisa menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran yang ada.

Sejumlah opsi yang dapat dipilih untuk memastikan pembiayaan *Program Review* antara lain:

1. Menggunakan anggaran monitoring dan evaluasi karena pada dasarnya *Program Review* merupakan metode untuk melakukan evaluasi
2. Di tingkat desa, *Program Review* dapat dilakukan oleh dan menggunakan anggaran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang memiliki tugas untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas kinerja pemerintah
3. Membiayai *Program Review* secara terpisah dengan menyiapkan regulasi pendukung sehingga pembiayaan terpisah dapat dianggarkan

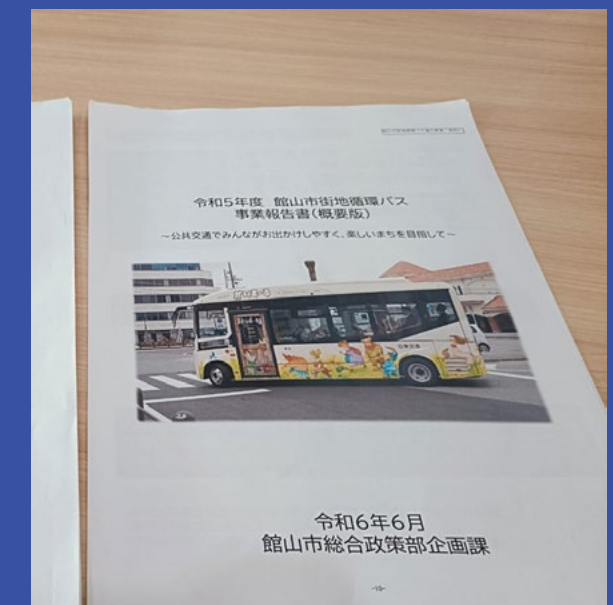
# Bab 06

Program Review  
Kota Tateyama,  
Jepang  
Agustus 2024



評価結果集計表

評価	(1) 不要・凍結	(2) 国・県・広域	(3)-1	(3)-2	(4)-1	(4)-2
			館山市 (要改善)	館山市 (統合・集約)	館山市 (実行通り)	館山市 (拡充・発展)
1 館山市地域循環・大運行事業	3-(1)	3	7	2		
2 福祉タクシー利用助成金	3-(1)	1	5	3	2	1
3 館山市ふるさと教育奨励金交付費	1	10	1			1
4-1 学童クラブ運営費	4-2(2)		1	2	4	5
4-2 放課後児童健全育成事業	4-(1)		1	3	5	3
5 ふるさと創生推進事業						





# Uji Coba Program Review di Kota Surabaya dan Kabupaten Sinjai

## Kota Surabaya

Kota Surabaya melaksanakan uji coba *Program Review* pertama di tahun 2023. Pada waktu itu program yang di-review adalah Program Pemberian Makanan pada Lansia, Yatim Piatu dan Penyandang Disabilitas, dengan melibatkan evaluator dari Bappeda Gresik dan Bappeda Sidoarjo. Program ini dihadirkan Pemerintah Kota Surabaya sebagai penyokong kehidupan masyarakat yang memiliki kondisi tertentu, yaitu kaum disabilitas, lanjut usia miskin dan/atau terlantar serta anak yatim dan/atau piatu dari keluarga fakir miskin. Salah satu upaya aktif yang telah dilakukan Pemerintah Kota Surabaya untuk meringankan beban bagi penduduk miskin dengan kriteria tersebut adalah dengan memberikan bantuan permakanan yang dikirimkan setiap hari kepada masing-masing penerima.

Program pemberian permakanan bukan saja bermanfaat sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi penduduk miskin, namun program ini juga memberikan keuntungan berupa penghasilan tambahan bagi penyedia permakanan yang dikelola oleh kelompok masyarakat. Dimulai dari warga yang menyediakan makanan, pengadaan kotak makan yang dipakai ulang oleh warga penerima manfaat untuk ditukar atau diisi makanan, dan warga penyedia jasa kurir untuk mengantar makanan ke penerima manfaat.



Suasana pelaksanaan Program Review tahun 2023 di Kantor Bappedalitbang Kota Surabaya.



Poster kegiatan sosialisasi dengan RRI

Program Permakanan ini kemudian dievaluasi oleh Pemerintah Kota Surabaya dan karena ditemukan kurang efisien serta tumpang tindih dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang lebih efisien, program ini pun tidak dilanjutkan di tahun 2024.

Di tahun 2024, Kota Surabaya kembali menyelenggarakan *Program Review* dengan memilih program yang terkait Pelayanan Posyandu Keluarga Untuk Lansia. Proses pembentukan panitia untuk tahun 2024 agak berbeda karena langsung melibatkan OPD pelaksana program yang saat itu Program Posyandu Keluarga untuk Lansia dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Surabaya. Jadi komponen panitia 50% Bappedalitbang dan 50% dari Dinas Kesehatan Kota Surabaya. Panitia kemudian melakukan sosialisasi lewat Radio Republik Indonesia (RRI) bersama Kepala Bappedalitbang Surabaya.



Suasana pelaksanaan Program Review di Kantor Bappedalitbang Surabaya. doc (Kominfo Surabaya)

## Kabupaten Sinjai

Sinjai adalah salah satu kabupaten di provinsi Sulawesi Selatan. Ibu kota kabupaten ini terletak di Sinjai Utara yang berjarak sekitar 220 km dari Kota Makassar. Kabupaten Sinjai memiliki luas wilayah 819,96 km<sup>2</sup> dan memiliki penduduk sebanyak 259.478 jiwa berdasarkan sensus penduduk tahun 2020. Kata Sinjai berasal dari kata “Sijai” yang dalam bahasa Bugis artinya “sama jahitannya.”

Pertemuan awal untuk pengenalan *Program Review* ke PJ Bupati Sinjai beserta dengan jajarannya dilakukan secara luring di awal tahun 2024. Setelah itu, proses pendampingan kepada panitia dan pengampu program dilakukan oleh Koso Nippon dan Yayasan Nusantara Sejati secara daring. Dalam prosesnya, berbagai sosialisasi dilakukan oleh PJ Bupati ke acara-acara Musrenbang sehingga *Program Review* semakin dikenal di wilayah Kabupaten Sinjai. Selain itu, Kepala Bappeda juga melakukan sosialisasi melalui radio Suara Bersatu Kabupaten Sinjai.



Poster kegiatan sosialisasi melalui radio Suara Bersatu



Suasana pelaksanaan Program Review di Alun-alun Kabupaten Sinjai. doc (Kominfo Kab. Sinjai)

Panitia Pelaksana melakukan proses pemilihan warga penilai secara terbuka melalui daring agar lebih transparan. Warga Penilai yang dipilih berjumlah 30 orang, masing-masing tiga orang per kecamatan yang dipilih secara acak dari data Disdukcapil Kabupaten Sinjai. Namun ada beberapa kecamatan yang warga penilainya tidak dipilih secara acak karena mempunyai wilayah kepulauan dengan kendala akses dan sebagian besar bekerja sebagai nelayan yang hanya kembali ke darat di waktu tertentu. Dari 30 orang tersebut, 27 orang hadir saat pelaksanaan *Program Review* di Alun-alun Bersatu Kabupaten Sinjai.

Menurut Kepala Bappeda, warga memberikan apresiasi dengan baik atas pelaksanaan *Program Review*, dari pagi mereka sudah hadir lebih awal untuk pelatihan mengisi lembar penilaian. Beberapa warga mengungkapkan baru pertama kali berpartisipasi dalam kegiatan Pemerintah Kabupaten Sinjai. Panitia pelaksana juga senang mendapatkan ilmu baru untuk mengevaluasi program kerja Pemkab Sinjai. Metode yang baru ini nantinya akan diterapkan dalam mengevaluasi beberapa program tidak hanya di tingkat Pemkab tapi juga di tingkat Kecamatan dan Kelurahan, itulah komitmen Pemerintah Kabupaten Sinjai. Komitmen ini telah direalisasikan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai, dan pada tahun 2025 akan kembali melaksanakan *Program Review* dengan didampingi Koso Nippon dan Yayasan Nusantara Sejati. Ke depan Pemkab berharap dapat memperluas lagi kebermanfaatannya di berbagai wilayah kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Sinjai.

# Pendapat Mereka tentang *Program Review*

---

Saya menghaturkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada lembaga Atmawidya Alterasi Indonesia yang telah melakukan ujicoba *Program Review* di *Kalurahan Sriharjo* dan *Kalurahan Guwosari*. Di tingkat Kabupaten Bantul, *Program Review* juga telah dilaksanakan pada 4 (empat) program yaitu Pajak Award, Pemasangan dan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum, Pelatihan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), serta Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Pedukuhan.

Selama ini *Program Review* melalui monitoring dan evaluasi yang dilakukan Pemerintah Daerah lebih condong pada aspek teknokrasi tanpa adanya pelibatan masyarakat. Sedangkan evaluasi pembangunan dengan metode *Program Review* ini dilaksanakan dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menjadi ‘hakim’ atas program pembangunan yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah. Pelibatan masyarakat sebagai penilai, serta kalangan birokrat, pengusaha, akademisi, dan praktisi sebagai evaluator adalah hal baru yang selama ini belum pernah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul.

Keterlibatan masyarakat dalam mengevaluasi program-program pembangunan pemerintah menjadi penting karena selain berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas, kegiatan pembangunan sebagai bagian dari pelayanan publik memerlukan umpan balik untuk menjaga kualitas dan memastikan relevansi program dengan kebutuhan dan permasalahan di masyarakat. Jadi *Program Review* ini sangat bermanfaat bagi upaya peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang saya pastikan akan mampu mendorong lahirnya masyarakat yang berdaulat dan pemerintahan yang demokratis. Karenanya metode *Program Review* ini akan saya kembangkan menjadi sebuah tradisi baru dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat mulai tahapan perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasinya.

**H. Abdul Halim Muslih, Bupati Bantul**

---

Terima kasih kepada BSKDN dan Koso Nippon yang telah memberi kesempatan kepada Kabupaten Sinjai menjadi Pilot Project *Program Review*. Pelibatan masyarakat yang dipilih secara acak dalam mengevaluasi program/kegiatan merupakan hal yang baru dan memberikan semangat untuk semakin meningkatkan kualitas dan kinerja program/kegiatan. Dengan *Program Review*, pemerintah memperoleh masukan sebagai bahan pertimbangan untuk melanjutkan, memperbaiki dan mengevaluasi kembali apakah program tersebut akan dilanjutkan atau disesuaikan kembali. Kalau tahun 2024 baru Program Home visit dan Home Care yang kita evaluasi, ke depan mudah-mudahan akan semakin banyak program yang kita *review* baik program di kabupaten dan akan kita teruskan sampai ke tingkat desa.

**TR. Fahsul Falah, S.Sos, M.Si, PJ. Bupati Sinjai**

---

“Saya sangat mengapresiasi pelaksanaan *Program Review* sebagai salah satu langkah penting dalam meningkatkan kualitas layanan Pemerintah Daerah kepada masyarakat. Melalui partisipasi aktif warga untuk *me-review* dan mengevaluasi pogram Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah dapat mengukur efektivitas program dan kegiatan yang telah dilaksanakan, serta mendapatkan umpan balik yang berharga untuk perbaikan ke depan. Di Kota Surabaya, kami telah melaksanakan 2 (dua) kali *program review* bekerjasama dengan Nippon Koso mengangkat tema yang berbeda. Pelaksanaan *Program Review* di Surabaya telah melibatkan berbagai pihak, mulai dari Kemendagri, Kedutaan Jepang di Surabaya, Perwakilan 2 (dua) Pemerintah Daerah lain sebagai evaluator hingga masyarakat yang dipilih secara acak. Kami mendapat banyak manfaat di antaranya adalah membantu meningkatkan kinerja program, memastikan sumber daya digunakan secara efektif dan efisien, serta tujuan program tercapai dengan lebih baik. Pogram *Review* adalah langkah nyata menuju pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Saya berharap *Program Review* ini dapat terus diperluas dan dimanfaatkan sebagai alat evaluasi yang efektif untuk menciptakan pelayanan publik yang dinamis dan terus berinovasi.”

**Ir. Irvan Wahyudrajad, MMT, Kepala Bappedalitbang Surabaya**

---

# Pendapat Mereka tentang *Program Review*

---

“Kami berharap dengan program yang di-*review* akan ada perubahan dan semakin baik dalam pelaksanaan program.”  
Warga Penilai Kota Surabaya

---

“Kegiatan *Program Review* ini sangat dibutuhkan untuk mensosialisasikan kegiatan / program yang diadakan *kalurahan* karena tidak semua masyarakat mengetahui program tersebut.”  
Warga Penilai Kalurahan Sriharjo

---

“Dengan *Program Review* ini, dapat diketahui *feedback* kegiatan yang sudah berjalan, poin-poin yang perlu diperbaiki dan saran masukan untuk perbaikan dan pengembangan program.”  
Panitia Pelaksana Kota Surabaya

---

“Hal baru yang saya pelajari adalah mengenai pentingnya tanggapan dan dukungan dari masyarakat (meski bukan sebagai sasaran intervensi).”  
Panitia Pelaksana Kota Surabaya

---

“Terima kasih telah mengundang kami. Mungkin program ini bisa berlanjut karena sangat bermanfaat bagi masyarakat.”  
Warga Penilai Kabupaten Sinjai

---

“Sebaiknya *Program Review* dilaksanakan per OPD agar maksimal.”  
Pengampu Program Kabupaten Bantul

---

“Perlu ada survei lapangan, menemui penerima program.”  
Panitia Pelaksana Kalurahan Guwosari

---

# Glosarium

---

**Program Review atau Review Program:** Metode evaluasi partisipatif yang menilai relevansi, efektivitas, dan efisiensi program pemerintah yang melibatkan masyarakat dan pihak luar sebagai evaluator.

---

**Panitia Pelaksana:** sejumlah orang yang dipilih untuk melaksanakan kegiatan *Program Review*, mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, hingga pelaporan hasil kegiatan kepada pemangku kepentingan di wilayahnya.

---

**Warga Penilai:** Sekelompok masyarakat yang dipilih secara acak dari populasi warga untuk memberikan penilaian atas pelaksanaan program pemerintah di daerahnya.

---

**Evaluator:** Sejumlah individu yang dipilih dari luar pelaksana program yang bertugas untuk mendalami, mempertajam, dan menggali informasi dari Pengampu Program agar Warga Penilai dapat mengambil keputusan terhadap program yang sedang di-*review*.

---

**Pengampu Program:** pelaksana program di setiap instansi pemerintah yang program/kegiatannya di-*review* dalam pelaksanaan *Program Review*.

---

**Kalurahan:** Sebutan desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintahan Kabupaten/ Kota dan *Kalurahan*

---

**Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal):** Sebutan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan *Kalurahan*

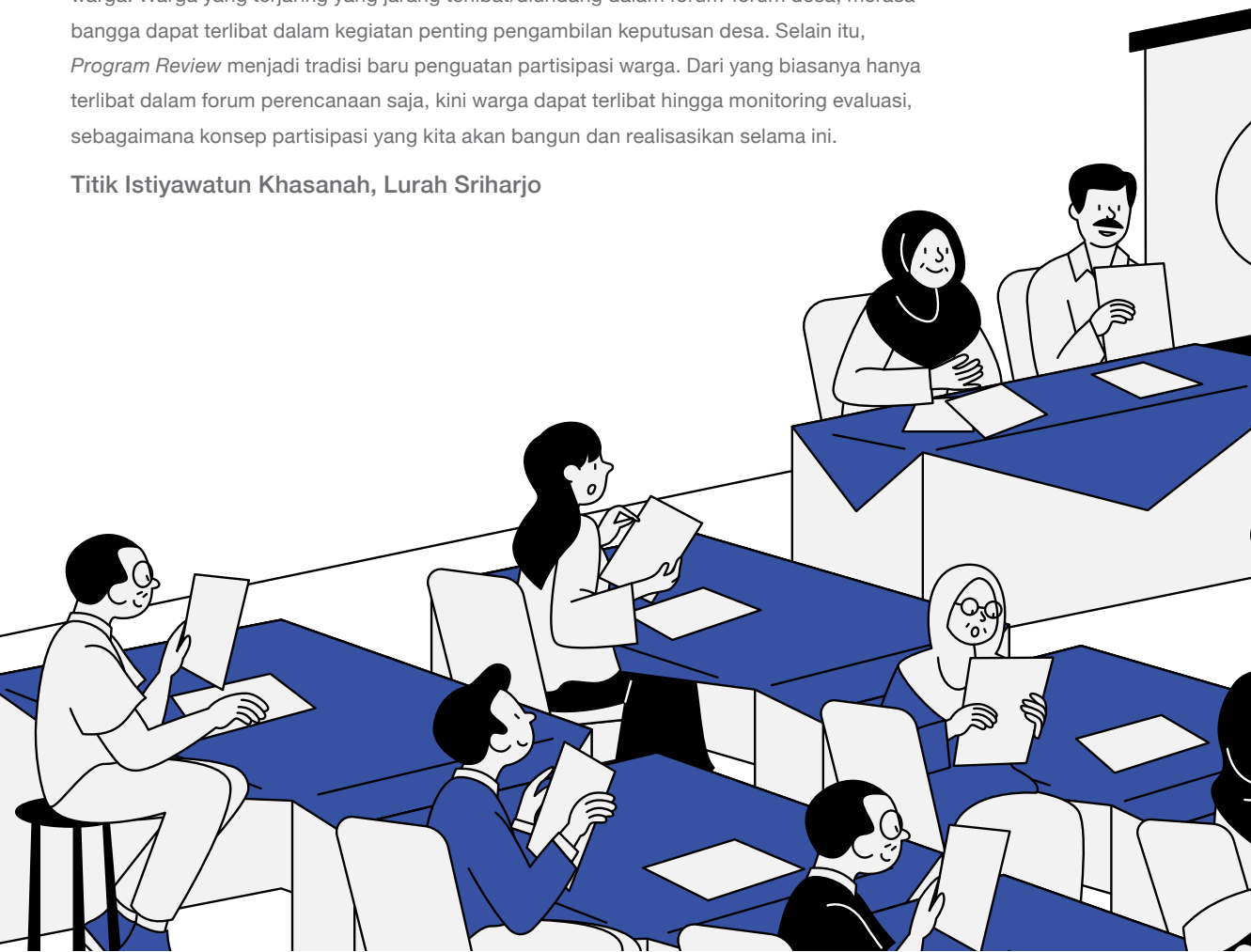
---

“Selama tiga tahun terakhir, *Kalurahan* Guwosari telah secara konsisten melaksanakan program evaluasi berbasis masyarakat sebagai bagian dari komitmen kami untuk memastikan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pembangunan. Program ini tidak hanya memberikan kesempatan bagi warga untuk menyampaikan aspirasi dan masukan, tetapi juga meningkatkan rasa kepemilikan terhadap kebijakan yang diterapkan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pendekatan ini membawa dampak positif dalam efektivitas program pembangunan, meningkatkan transparansi, serta memperkuat hubungan antara pemerintah *kalurahan* dan masyarakat. Kami percaya bahwa keberlanjutan program ini akan terus memperkuat partisipasi masyarakat dan mendukung pembangunan yang inklusif.”

**Masduki Rahmad, Lurah Guwosari**

*Program Review* memberikan pembelajaran yang berarti bagi kami tentang metode jitu pelibatan warga dalam pengambilan keputusan yang ada di desa. Model random dalam pelibatan warga, memberikan pembelajaran tersendiri baik bagi pemerintah desa maupun warga. Warga yang terjaring yang jarang terlibat/diundang dalam forum-forum desa, merasa bangga dapat terlibat dalam kegiatan penting pengambilan keputusan desa. Selain itu, *Program Review* menjadi tradisi baru penguatan partisipasi warga. Dari yang biasanya hanya terlibat dalam forum perencanaan saja, kini warga dapat terlibat hingga monitoring evaluasi, sebagaimana konsep partisipasi yang kita akan bangun dan realisasikan selama ini.

**Titik Istiyawatun Khasanah, Lurah Sriharjo**



**Alamat**

YNS Jakarta  
Jl. Gereja No. 51 RT 007 RW 009, Cilandak  
Barat, Cilandak, Jakarta Selatan, Indonesia

**Kontak**

(e) [iggrd@iggrd.or.id](mailto:iggrd@iggrd.or.id)  
(t) +62 815-1047-3971